



KEMENTERIAN PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

# KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS



**BKDI Luncurkan GOLDUD dan GOLDID**

**Kuartal I Pembiayaan**

**SRG Rp 8,78 miliar**

# Menggali PBK 'Macan Asia' Hongkong





# DARI REDAKSI

Tim Panja Komisi VI DPR RI baru-baru ini melakukan kunjungan kerja di bursa berjangka Hongkong. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka memperkaya pengetahuan dan wawasan terkait dengan pembasahan perubahan UU No. 32/1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Industri perdagangan berjangka Hongkong yang dikunjungi adalah The Chinese Gold and Silver Exchange Society (CGSL), dan salah satu perusahaan pialang berjangka yakni Success Futures and Foreign Exchange Limited (SFEL).

Instrumen perdagangan berjangka Hongkong sudah cukup lama berkembang dan tumbuh pesat. Hingga Hongkong dikenal sebagai salah satu tujuan investasi di Asia dan dari berbagai belahan dunia lainnya.

Kunjungan ke pelaku perdagangan berjangka Hongkong, itu, diperoleh berbagai informasi guna mendukung pengembangan perdagangan berjangka di Indonesia. Diketahui, Securities and Futures Commission (SFC)- lembaga badan pengawas perdagangan berjangka Hongkong, sangat ketat melakukan pengawas dan penegakan peraturan. Dengan ketatnya pengaturan itu, nyaris tidak ada pelanggaran dan praktik yang tidak sesuai dengan aturan. Pelaku usaha diwajibkan menyampaikan laporan transaksi harian. Dengan laporan harian itu, dapat dideteksi secara dini pelanggaran yang mungkin dilakukan pelaku pasar.

Di samping pengawasan dan pengaturan yang sangat ketat, program edukasi dan sosialisasi memegang peran penting dalam menciptakan para pelaku perdagangan berjangka yang taat hukum.

Berebekal dari kunjungan ke pelaku perdagangan berjangka Hongkong itu, terdapat peluang untuk mengembangkan perdagangan berjangka di Indonesia. Karena Indonesia kaya akan komoditi primer yang bisa dijadikan basis kontrak berjangka. Selain itu, kontrak derivatif bisa diperdagangkan di

bursa layaknya di Hongkong.

Tetapi kata kuncinya hanya satu, pengaturan dan penegakan hukum yang ketat sehingga tidak ada praktik yang dilanggar.

Perkembangan dari Sistem Resi Gudang (SRG) juga dilaporkan pada edisi ini. Fasilitas pergudangan yang sudah memadai dan tersebar di sebanyak 45 daerah, membawa pembiayaan SRG pada kuartal pertama 2011 mencapai Rp 8,78 miliar. Atau terjadi peningkatan sebesar 102 % dari tahun 2010.

Peningkatan pembiayaan itu juga didorong meningkatnya pemahaman petani akan manfaat SRG. Serta, adanya insentif bunga dari pemerintah yang disalurkan melalui bank yang ditunjuk. Jika prestasi itu bisa dipertahankan, bukan tidak mungkin dalam masa panen komoditi yang akan datang akan terjadi lonjakan pembiayaan SRG. Bappebti menargetkan, tahun ini pembiayaan SRG bisa mencapai Rp 40 miliar.

Sementara itu, dari industri perdagangan berjangka komoditi dalam negeri ada juga kabar baik. Pada 11 April 2011, lalu, BKDI resmi meluncurkan dua kontrak berjangka baru, yakni kontrak tunda serah emas berdenominasi rupiah (GOLDUD) dan dolar Amerika Serikat (GOLDUSD).

Dua kontrak berjangka baru itu diharapkan bisa mendorong transaksi multilateral. Agaknya harapan itu bisa juga dicapai. Sebab, dilaporkan BKDI, pada hari kedua perdagangan GOLDUD dan GOLDUSD ditransaksikan sebanyak 738 lot. Dengan nilai transaksi sebesar 8,3 juta dolar Amerika.

Nah, semoga transaksi multilateral khususnya kontrak berjangka berbasis emas bisa meningkatkan volume perdagangan di tengah harga emas dunia yang senantiasa fantastis. Salam!



gkin



**Penerbit:** Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

**Penasihat/Penanggung Jawab:** Syahrul R. Sempurnajaya

**Pemimpin Redaksi:** Nizarli **Wakil Pemimpin Redaksi:** Natalius Nainggolan

**Dewan Redaksi:** Harry Prihatmoko, Diah Sandita Arisanti, Poppy Juliyanti, Subagyo, Dharmayugo Hermansyah, Sri Haryati, Rizali Wahyuni **Sirkulasi:** Sapi Siswantoro, Katimin.

**Alamat Redaksi:** Gedung Bappebti Jl. Kramat Raya No. 172, Jakarta Pusat. [www.bappebti.go.id](http://www.bappebti.go.id)

*Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail: [buletin@bappebti.go.id](mailto:buletin@bappebti.go.id)*

# DAFTAR ISI



9-11

## Resi Gudang

Kuartal I Pembiayaan  
SRG Rp 8,78 miliar

20-21

## Komoditi

Minyak Cendana 'Emas Cair'  
Indonesia



28

## Kiprah

Laurentius Gunawan  
Gasak Transaksi  
Multilateral



Laporan Utama.....4-7

- Menggali PBK 'Macan Asia' Hongkong
- BKDI Luncurkan GOLDUD dan GOLDID

Berjangka.....8

- Pemerintah Dukung PBK

Pasar Lelang.....12-13

- KADIN Jatim Menimba Ilmu di Bappebti

Agenda.....14-15

Aktualita.....16-17

- Tiga Bulan QF Harus Beroperasi
- Pemda Tidak Serius Dukungan SRG Dicabut
- Pialang 'Tidur' Gunakan Pasal 96 PP No. 9 /1999
- PFI Transaksikan Kontrak PALN

Analisa.....18

- Harga CPO Naik, TBS Turun
- Cuaca Buruk Harga Rumput Laut Surut

Info Harga.....19

Break News.....22-23

- Foreign investor develops downstream industry of CPO.
- Commodity futures contract development strategy.
- Traditional Market revitalization spent 505 billion.
- Driving the development & increasing the competitiveness.

Wawasan.....24-25

- Keberhasilan Kontrak Berjangka

Kolom.....26-27

- Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi



# Menggali PBK 'Macan Asia' Hongkong

*Amandemen UU No.32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi, yang saat ini sedang dibahas di Komisi VI DPR RI, memerlukan pengkajian lebih detail termasuk menggali pengalaman dari negara lain yang telah maju di bidang perdagangan berjangka.*

Perdagangan berjangka komoditi di Hongkong merupakan instrumen yang sangat diminati investor sebagai salah satu sarana investasi. Instrumen perdagangan modern itu sudah cukup lama berkembang dan tumbuh pesat, hingga Hongkong dikenal sebagai salah satu tujuan investasi di Asia dan dari berbagai belahan dunia lainnya.

Pesatnya perkembangan bursa berjangka Hongkong tak ayal bisa dijadikan sebagai salah satu acuan pengembang bursa sejenis di Indonesia. Terkait itu, Tim Panja Komisi VI DPR RI yang saat ini sedang melakukan pembahasan perubahan UU No. 32/1997, tentang perdagangan berjangka komoditi, baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Hongkong. Kunjungan itu guna menggali wawasan dan pengetahuan yang lebih banyak tentang perdagangan berjangka Hongkong. Dalam kesempatan itu, Tim Panja Komisi VI DPR didampingi Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya dan Kepala Biro Hukum Bappebti, Alfons Samosir. Sedangkan dari pelaku usaha terdapat Dirut Jakarta Futures Exchange (JFX), Made Soekarwo dan Dirut Kliring Berjangka Indonesia, Surdiyanto Suryodarmodjo. Industri perdagangan berjangka Hongkong yang dikunjungi

adalah The Chinese Gold and Silver Exchange Society (CGSL), dan salah satu perusahaan pialang berjangka yakni Success Futures and Foreign Exchange Limited (SFEL).

"Dari kunjungan ke pelaku perdagangan berjangka Hongkong, itu, 'benang merahnya' dengan perdagangan berjangka di Indonesia pada dasarnya tidak banyak perbedaan," jelas Syahrul R Sempurnajaya.

Terutama terkait dengan kegiatan perusahaan pialang berjangka dan bursa berjangka, dalam transaksi komoditi maupun transaksi derivatif di luar bursa- over the counter (OTC). Otoritas perdagangan berjangka Hongkong diketahui sangat ketat mengatur transaksi di bursa dan produk-produk OTC, tambahnya.

"Oleh karena ketatnya pengaturan perdagangan berjangka di sana, tidak banyak terjadi pelanggaran dalam transaksi di bursa maupun dari para pialang berjangka. Di samping pengawasan dan pengaturan yang sangat ketat, program edukasi memegang peran penting dalam menciptakan para pelaku perdagangan berjangka yang taat hukum," kata Syahrul.

Dari diskusi dengan pelaku perdagangan berjangka Hongkong, itu, diketahui semua produk OTC

derivatives dan komoditi primer, bebas untuk ditransaksikan setelah mendapat ijin dari Otoritas. Namun demikian, hanya beberapa produk OTC derivatif dan komoditi yang ditransaksikan oleh bursa. Hal itu dikarenakan tidak mendapat respons positif dari para pelaku pasar. Di sisi lain, semua bursa dan pialang yang ada memiliki segmen pasar dan investor yang satu sama lainnya tidak saling mengganggu.

Di lihat dari segi wilayah dan sumberdaya alam, Indonesia memiliki peluang yang jauh lebih besar dalam mengembangkan bursa berjangka dan OTC derivatif dibandingkan Hong Kong. Hal itu mengingat Indonesia memiliki sejumlah komoditi dunia yang sangat laku dipasaran internasional.

Dalam paparan petinggi SFEL, Frakie Yeung, ijin perusahaan pialang berjangka diberikan otoritas bersamaan dengan kontrak derivatif OTC yang akan diperdagangkan. Untuk perijinan kepada pelaku pialang, pihak otoritas tidak terlalu berbelit-belit. Lain halnya dengan di Indonesia, setiap pengurus perusahaan pialang berjangka wajib mengikuti ujian fit and proper test sebelum diberikan ijin untuk mendirikan perusahaan pialang.

Terkait dengan perijinan wakil pialang berjangka, relatif sama dengan di Indonesia.

“Di Hongkong, seseorang yang ingin menjadi wakil pialang juga harus mendapatkan ijin dari otoritas. Hal itu juga dilakukan di Indonesia. Bedanya, di samping ujian tertulis setiap wakil pialang wajib mengikuti fit and proper test,” jelas Syahrul.

Sementara itu, menurut Alfons Samosir, dalam pengawasan transaksi para perusahaan pialang diwajibkan melaporkan setiap transaksi harian kepada otoritas Hongkong, yakni Securities and Futures Commission (SFC). Dengan laporan harian itu, nyaris tidak pernah ada permasalahan dengan transaksi karena sistem pengawasan sudah berjalan dengan baik.

Ketentuan laporan transaksi harian yang ditetapkan SFC itu, untuk mengetahui adanya pelanggaran yang terjadi dan dengan demikian investor dapat terlindungi dengan baik. Sistem ini hampir sama dengan sistem pengawasan tunggal yang diterapkan di Indonesia saat ini, dimana setiap transaksi diawasi dengan sistem pengawasan tunggal (single platform).

Dijelaskan pula, tambah Alfons, pelanggaran atas peraturan yang menyangkut masalah transaksi akan di hukum berat. Pada umumnya perusahaan pialang di Hong Kong sangat kredibel dan termasuk kategori perusahaan besar yang beresiko tinggi. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran atau “abuse” maka setiap perusahaan pialang harus melakukan deposit atau modal paling sedikit HKD. 30 juta, setara Rp 30 miliar. Dana sebesar HKD 30 juta tersebut juga merupakan modal kerja dan jaminan atas transaksi yang dilakukan.

Sementara itu, initial margin ditetapkan SFC sebesar HKD. 60.000. Hal ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang ingin bertransaksi OTC derivatif adalah pihak yang memiliki dana cukup. Dengan demikian masyarakat berpenghasilan pas-pasan akan tersaring secara alamiah untuk tidak tergiur transaksi di bursa.

## Bebas Pajak

Pelanggaran atau ‘abuse’ atas transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian pada nasabah sangat jarang terjadi di Hongkong. Hal itu disebabkan karena para investor pada umumnya adalah nasabah yang sudah tereduksi dengan baik dan sudah menjadi budaya tertib hukum dan transparan. Oleh karena itu, di samping peraturan dan perundang-undangan UU yang sangat ketat, masyarakat Hongkong sudah tereduksi dengan baik.

Dalam penjelasan Frakie Yeung, diketahui bahwa edukasi termasuk hal yang sangat penting dalam kegiatan perusahaan pialang dan otoritas. Dari sisi perusahaan pialang, setiap calon investor wajib diberikan edukasi tentang cara bertransaksi yang benar dan secara tegas dikemukakan tentang masalah risiko dari bertransaksi melalui pialang.

“SFC setiap tahun proaktif mengadakan program edukasi dan sosialisasi kepada para pelaku maupun masyarakat. Program yang sudah terjadwal itu antara lain dilakukan melalui media cetak dan elektronik. Dalam sosialisasinya, SFC tidak hanya menjelaskan masalah risiko, tetapi juga mengenai kontrak-kontrak yang diperjual-belikan di bursa,” ungkap Alfons Samosir.

Dikemukakan pula, sekitar 80 % para investor Hongkong sudah mengerti cara-cara bertransaksi termasuk masalah risiko.

Di bidang perpajakan, pemerintah Hongkong tidak mengenakan pajak atas transaksi derivatif. Kebijakan ini merupakan salah satu stimulus yang membuat perusahaan pialang baik yang bertransaksi kontrak komoditi maupun OTC derivatif berkembang pesat.

Kontrak OTC derivatif yang diminati masyarakat Hongkong antara lain mata uang asing (forex), index saham seperti Han Seng Index Futures, Options, Mini Han Seng, Mini Han Seng Futures, Han Seng China Enterprises, Han Seng Chi-

na Enterprises (H-Shares) Indeks and Options, Derivatives dari Hong Kong Futures Exchange Limited, maupun emas.

## Spesialis komoditi

Sementara itu, ketika mengunjungi CGSE Tim Panja Komisi VI DPR memperoleh informasi bahwa, bursa membedakan antara pialang yang mengalurkan amanat nasabah dengan trader yang mengambil posisi melawan nasabahnya. Di bursa CGSE status keanggotaan terdiri dari anggota yang boleh bertransaksi atas semua produk yang ada di bursa yaitu, bullion, futures, stocks dan indeksnya dan leverage forex. Anggota yang bertransaksi terbatas pada bullion dan stock saja. Dan, Anggota yang bertransaksi hanya pada bullion saja.

Pada kesempatan itu, Tim Panja DPR juga menggali mengapa CGSE tidak memperdagangkan derivatif lainnya dan apakah kehadiran OTC derivatif mengganggu kegiatan dari CGSE? Penjelasan yang diperoleh dari petinggi CGSE diketahui bahwa, CGSE memilih spesialisasi di bidang perdagangan emas dan indeks emas dan perak. Di bidang ini, CGSE sudah besar dan telah memiliki segmen pasar tersendiri. Dengan demikian, transaksi di CGSE sama sekali tidak terganggu oleh adanya banyak transaksi OTC derivatif yang dilakukan oleh banyak pialang-pialang. Namun demikian, CGSE dapat saja memperdagangkan transaksi OTC derivatif asalkan mengajukan permohonan ijin kepada pihak otoritas.

Hongkong termasuk kota pulau yang penduduknya relatif kecil, berkisar sekitar enam juta jiwa. Masyarakat Hongkong lebih selektif memilih produk-produk yang likuid dan memiliki segmen pasar tertentu. Walau pun produk-produk OTC derivatif sangat banyak, produk tersebut belum tentu dapat menarik pihak pasar karena Hongkong sangat market oriented. Ditegaskan pula, bahwa sangat banyak produk OTC derivatif yang tidak laku di bursa atau tidak likuid. ▲



# BKDI Luncurkan GOLDUD dan GOLDID

Kontrak berjangka GOLDUD dan GOLDID mewarnai perdagangan berjangka emas di bursa berjangka Indonesia. Dua kontrak berjangka ini diharapkan mendongkrak volume transaksi multilateral dan sarana investasi di tengah lonjakan harga emas di pasar internasional

Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) memperkaya kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan kepada masyarakat. BKDI secara resmi meluncurkan dua kontrak berjangka baru yakni kontrak tunda serah emas berdenominasi rupiah (GOLDID) dan dolar Amerika Serikat (GOLDUD), pada 11 April 2011. Kontrak berjangka GOLDID dan GOLDUD itu melengkapi dua kontrak berjangka yang sebelumnya sudah ditawarkan yakni kontrak berjangka CPOTR dan kontrak berjangka GOLDGR.

Hadir dalam peluncuran kontrak berjangka GOLDUD dan GOLDID, diantaranya, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi (Bappebti) Syahrul R Sempurnajaya, jajaran pejabat Bappebti, Komisariss dan Direksi BKDI serta para pelaku pasar.

Sehari setelah diluncurkan (12 April 2011), transaksi GOLDUD dan GOLDID di BKDI berhasil ditransaksikan sebanyak 738 lot. Dengan nilai transaksi sebesar 8,3 juta dolar Amerika. Berdasarkan data transaksi BKDI, diketahui GOLDUD ditransaksikan

mencapai volume 580 lot, sedangkan transaksi GOLDID sebanyak 158 lot.

Besarnya volume transaksi GOLDUD dan GOLDID menggambarkan minat investor pada perdagangan kontrak emas cukup tinggi. Diperkirakan investor akan terus memburu transaksi kontrak emas ini di BKDI, mengingat prospek harga komoditi tersebut di pasar internasional menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dibandingkan komoditi lainnya. Serta, adanya kebutuhan masyarakat atas instrumen investasi yang aman seperti emas.

## Kerjasama Pegadaian

Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, dalam sambutannya saat peluncuran GOLDUD dan GOLDID, mengatakan, BKDI baru beroperasi sekitar dua tahun tetapi sudah baik meletakkan dasar sebagai bursa berjangka.

"Sehingga di masa yang akan datang berpeluang untuk meluaskan kontrak berjangka komoditi termasuk kontrak derivatif lainnya," kata Syahrul.

Oleh karena itu, kami harapkan

BKDI senantiasa kreatif menciptakan kontrak berjangka baru, tambah Syahrul. Termasuk bisa kerjasama dengan instansi lain dalam mengembangkan kontrak berjangka komoditi.

"Kerjasama dengan pihak lain, misalnya menggandeng kerjasama Perum Pegadaian sebagai tempat transaksi dan delivery point dari kontrak berjangka emas. Hal itu agar transaksi bisa jauh lebih efisien," jelas Syahrul.

"Ini baru wacana, BKDI bisa melakukan suatu kerjasama dengan Perum Pegadaian agar para pedagang yang di daerah mulai berpikir untuk menginvestasikan emasnya di bursa berjangka dan tidak lagi menyimpan uangnya di bawah bantal atau sekedar disimpan di lemari saja," papar Syahrul.

Lebih jauh dikatakan, budaya masyarakat kita dalam bertransaksi masih harus melihat bentuk fisiknya. Jadi, dengan ada kerjasama dengan Perum Pegadaian sebagai delivery point, baik para pedagang fisik emas atau para ibu-ibu yang ada di daerah bisa bertransaksi emas dengan melihat fisiknya di Pegadaian.

“Dalam satu tahun ini, return investasi emas berkisar 18 hingga 20 %. Dan, dalam satu minggu belakangan ini makin gila lagi, return investasi emas lebih dari 2%,”

Sementara itu, Direktur Utama BKDI, Megain Widjaja, menimpali, wacana kerjasama dengan Perum Pegadaian sudah ada dari sejak satu setengah tahun yang lalu. “Tetapi pada tahap awal kami sudah kerjasama dengan PT Antam sebagai delivery point- serah terima fisik emas. Namun, nantinya pun BKDI tidak menutup kemungkinan akan melakukan kerjasama dengan Perum Pegadaian.”

“Yang terpenting saat ini dilakukan adalah membentuk brand image. Jika brand image sudah terbentuk, perdagangan fisik emas di daerah dan pialang berjangka pun akan lebih mudah dikerahkan. Tetapi saya harapkan mereka pun harus berpartisipasi,” tegas Megain

Di sisi lain, Megain Wijaya, menuturkan, kontrak berjangka GOLDUD dan GOLDID diperdagangkan di dalam bursa dan tidak diperdagangkan secara over the counter (OTC) atau di luar bursa sehingga lebih transparan bagi investor.

“Kami berharap dengan harga yang transparan dapat menuju pembentukan harga yang lebih efisien. Inilah jadi alasan dasar kami meluncurkan produk GOLDUD dan GOLDID, selain tentunya untuk memenuhi kebutuhan investor,” kata Megain.

“Kita ketahui belakangan ini investasi pada komoditi emas sangat menjanjikan keuntungan, dengan pergerakan harga yang senantiasa fantastis di pasar internasional. Dalam satu tahun ini, return investasi emas berkisar 18 hingga 20 %. Dan, dalam satu minggu belakangan ini makin gila lagi, return investasi emas lebih dari 2 %,” jelas Megain.

Jadi, inilah salah satu alasan kami untuk tidak menunda lagi meluncurkan GOLDUD dan GOLDID, tambahnya.

## Multilateral Sejati

Lebih jauh dipaparkan Megain Widjaja, transaksi kontrak GOLDUD dan GOLDID akan dijamin dan diselesaikan oleh lembaga kliring- Identrus Security International (ISI), guna meminimalkan risiko gagal bayar (default).

Di pihak lain, Direktur ISI, Nursalam, mengatakan, lembaga kliring kami akan mengawasi dan menjamin penyerahan sampai barang benar-benar diterima, tidak hanya penyerahan di atas kertas atau dokumen.

“Kami akan mengawasi dan menjamin penyerahan setiap kontrak karena industri ini harus memiliki integritas yang cukup tinggi. Sampai den-

gan saat ini kami sudah melakukan tujuh kali penyerahan fisik kontrak emas. Jadi, transaksi GOLDUD dan GOLDID ini tidak perlu diragukan lagi,” katanya.

Namun sebelumnya, tambah Nursalam, kami perlu menjelaskan, sebelum GOLDUD dan GOLDID ditawarkan, kami sudah mengkaji karakteristik investor emas mulai dari Sabang hingga Papua.

“Dari hasil kajian itulah maka kami menawarkan kontrak GOLDUD dan GOLDID dalam satuan 10 troy oz per lot-nya. Untuk kontrak GOLDID, penyelesaian transaksi menggunakan mata uang rupiah dengan fixed rate Rp 10.000 per dolar Amerika,” terang Nursalam.

Sedangkan mekanisme transaksi, tambahnya, multilateral sejati. Dan, dalam sistem tersedia volume transaksi, open interest, serta market data. “Yang terpenting lagi, tersedia harga jual dan beli.”

Senada dengan itu, Megain Widjaja, menambahkan, tujuan BKDI me-

luncurkan GOLDUD dan GOLDID yakni melengkapi kontrak berjangka yang sudah ada. Sehingga masyarakat selaku investor memiliki pilihan untuk bertransaksi.

“Bicara soal target volume perdagangan GOLDUD dan GOLDID, tentunya sudah kami tetapkan. Setidaknya perhari hingga semester pertama 2011 ini, sekitar 200 lot perhari. Dan semester kedua nantinya bisa melebihi 500 lot perhari, jelas Megain.

Di sisi lain, Megain Widjaja, memaparkan, harga perdagangan GOLDUD dan GOLDID saat ini sudah bisa diakses melalui situs bloomberg. Hal itu dimaksudkan agar investor asing pun bisa masuk bertransaksi di BKDI.

“Setidaknya informasi yang ada di situs itu menginformasikan bahwa di Indonesia pun ada transaksi kontrak berjangka emas,” kata Megain Widjaja. ▲



# Pemerintah Dorong Industri PBK

Perdagangan berjangka komoditi Indonesia sudah lebih dari sepuluh tahun. Namun, industri ini belum berkembang seperti yang diharapkan. Indonesia sebagai produsen dari berbagai komoditi dunia seharusnya bisa menjadi pasar potensial. Sehingga berkontribusi dalam perekonomian nasional.

Sejumlah komoditi primer yang diproduksi Indonesia saat ini diperdagangkan diberbagai bursa berjangka luar negeri. Demikian pula dengan para pelaku komoditi, lebih menyukai bertransaksi di bursa asing.

Produsen crude palm oil (CPO) dari dalam negeri diperkirakan sebanyak 60 % bertransaksi di bursa berjangka Malaysia. Demikian juga dengan produsen dari berbagai komoditi lainnya seperti kakao, karet, batubara, timah, kopi, emas, dan lada.

Untuk menggairahkan industri perdagangan berjangka komoditi di dalam negeri, pemerintah akan mengkaji berbagai faktor penghambat. Sehingga para produsen komoditi tersebut lebih tertarik bertransaksi di bursa berjangka Indonesia.

Demikian antara lain diutarakan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Syahrul R Sempurnajaya, disela-sela peluncuran kontrak berjangka GOLDUD dan GOLDID, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), 11 April 2011.

"Bappebti menilai transaksi kontrak berjangka komoditi primer di bursa berjangka Indonesia belum likuid. Ada beberapa faktor yang menghambat dari perkembangan industri ini. Untuk itu, Bappebti akan mengkaji berbagai faktor penghambat tersebut," jelas Syahrul.

Di samping faktor penghambat itu, terdapat juga permasalahan dari dalam industrinya sendiri, tambah Syahrul.

"Permasalahannya antara lain, kurangnya partisipasi aktif pelaku pasar, minimnya kerjasama antara stakeholder. Sosialisasi dan edukasi

perdagangan berjangka komoditi pun masih sangat minim. Selain itu, keterbatasan tempat penyerahan fisik di beberapa daerah sentra produksi pun belum maksimal," ungkap Syahrul.

Menurut Syahrul, partisipasi pelaku pasar dalam melakukan transaksi komoditi primer di bursa berjangka tergolong rendah. "Hanya 53 % dari sebanyak 62 perusahaan pialang berjangka yang aktif melakukan transaksi komoditi primer di bursa berjangka. Transaksi mereka itu baru berkisar 4,13 % dari seluruh transaksi perdagangan berjangka."

"Rendahnya volume transaksi itu akibat minimnya pengetahuan dan minat pelaku usaha komoditi ataupun investor terhadap penggunaan manajemen risiko perlindungan," tegas Syahrul.

Di sisi lain, lanjutnya, ada kendala tambahan berupa belum optimalnya penegakan hukum atas pelanggaran terhadap peraturan perdagangan berjangka yang memicu pengaduan masyarakat.

## Faktor Pajak

Sementara itu, Dirut BKDI, Megain Widjaja, mengatakan, salah satu faktor penghambat rendahnya minat produsen komoditi pertransaksi di bursa berjangka Indonesia akibat sistem perpajakan yang tidak kondusif.

"Persoalan pajak menjadi faktor pendorong utama pelaku usaha komoditi dari dalam negeri lebih tertarik melakukan transaksi di bursa luar negeri dibandingkan di bursa berjangka Indonesia," ungkap Megain.

"Dari analisa kami, produsen CPO Indonesia lebih tertarik bertransaksi dibursa berjangka Malaysia. Saya perkiraan setidaknya 40 % hingga 60 % transaksi yang terjadi di bursa Malaysia berasal dari produsen CPO Indonesia. Produsen itu pun lebih suka menjual produknya di Malaysia dibandingkan bursa di dalam negeri," tegas Megain.

Senada dengan itu, Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, mengatakan, persoalan perpajakan

di bidang perdagangan berjangka ini menjadi salah satu masalah yang harus segera dicari jalan keluarnya. Sehingga industri ini kondusif bagi produsen CPO dari dalam negeri.

"Pajak itu penting bagi pendapatan negara, tetapi iklim usaha juga harus dibikin menarik dari sisi perpajakan," kata Syahrul.

Oleh karena itu, Bappebti bersama pelaku perdagangan berjangka akan memperjuangkan sistem perpajakan tersebut sehingga menguntungkan bagi pelaku komoditi tetapi pemerintah juga mendapatkan pendapatan dari industri ini, tambah Syahrul.

## Batubara

Meski sistem perpajakan belum mendukung bagi pelaku perdagangan berjangka komoditi, BKDI senantiasa melakukan berbagai inovasi untuk mengembangkan kontrak berjangka komoditi. Sejak berdirinya BKDI, bursa ini sudah berkomitmen mengembangkan produk kontrak berjangka dalam tiga kelompok besar, yakni soft agriculture, metal, dan energi. Megain Widjaja, mengatakan, peluang diperdagangkannya kontrak berjangka batubara di BKDI sangat tinggi. Apalagi batubara termasuk salah satu komoditi andalan Indonesia.

"Faktor fluktuasi harga kerap menjadi polemik dalam industri batubara. Inilah yang menjadi celah untuk mengembangkan kontrak berjangka batubara," jelas Megain.

Dengan demikian, pelaku pasar dan konsemen batubara membutuhkan sarana lindung nilai sebagai proteksi terhadap fluktuasi harga. Oleh karena itu BKDI berencana mengembangkan kontrak berjangka multilateral komoditas batubara.

"Fungsi lindung nilai seperti itu dibutuhkan oleh industri batubara. Sekarang kami sedang menyiapkan kontrak batubara. Untuk itu kami sudah melakukan berbagai kajian dan berhubungan dengan para pelakunya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri," ujar Megain Widjaja. ▲

# Kuartal I Pembiayaan SRG Rp 8,78 miliar

Meningkatnya pemahaman petani akan manfaat sistem resi gudang (SRG) dan didukung ketersediaan sarana pergudangan di daerah, pembiayaan pasca panen ini pada kuartal pertama tahun 2011 sudah menembus Rp 8,78 miliar. Atau mengalami peningkatan sekitar 102 % dibandingkan seluruh nilai resi gudang pada tahun 2010.

Di samping itu, terjadinya peningkatan pembiayaan SRG ini didorong adanya kebijakan pemerintah meringankan bunga bank, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2009, tentang skema subsidi SRG. Pada kebijakan itu, subsidi bunga disalurkan melalui bank-bank pelaksana yang ditunjuk Menteri Keuangan.

Berdasarkan kebijakan itu, pemerintah telah menetapkan bank penyalur subsidi resi gudang masing-masing Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank BRI dan Bank Kalsel. Dalam penyaluran subsidi tersebut, yang berhak menerima hanya petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi. Sedangkan besaran sub-

sidi bunga SRG ditetapkan sebesar 6 % per tahun. Sedangkan selisih tingkat bunga subsidi dengan beban bunga peserta SRG merupakan subsidi pemerintah.

Berdasarkan perkembangan SRG di kuartal pertama 2011 itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menargetkan nilai komoditi yang masuk skema SRG hingga akhir tahun 2011 bisa mencapai Rp 40 miliar.

Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, mengatakan, sepanjang kuartal I tahun 2011, ini, telah terjadi lonjakan pencapaian program sistem resi gudang.

"Kenaikan nilai pembiayaan SRG itu dipengaruhi beberapa faktor, yakni mulai terpenuhinya kelengkapan sarana gudang, berjalannya proses pendampingan, dan bantuan sejumlah pemerintah daerah di lokasi gudang," ungkap Syahrul.

Di samping itu, kata Syahrul, peraturan tentang pemberian subsidi bunga kredit resi gudang bagi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi juga turut mendorong minat petani dalam memanfaatkan skema tersebut. "Oleh

karena itu kami harapkan pencapaian program resi gudang tersebut dapat berlanjut hingga penghujung tahun ini jika sosialisasi dan dorongan stakeholder terus ditingkatkan."

"Gudang-gudang yang dibangun 2009 dan 2010 mulai menunjukkan kinerjanya. Jika melihat perkembangan SRG, saya yakin pencapaian tahun ini dapat melonjak 500 % dan nilai komoditas yang diikuti sertakan dapat melampaui target Rp 40 miliar," jelas Syahrul.

Dari data yang dilansir Bappebti, sepanjang Januari hingga April 2011, pengelola gudang telah menerbitkan sebanyak 103 resi gudang. Dari jumlah resi gudang yang diterbitkan itu, mencakup 3.976,2 ton komoditas pangan. Sedangkan nilai komoditi yang digudangkan mencapai sebesar Rp 16,16 miliar.

Volume dan nilai komoditas tersebut melonjak masing-masing 73 % dan 86,25 % dibandingkan pencapaian sepanjang 2010 sebanyak 2.299,94 ton dengan nilai Rp 8,78 miliar. Adapun jumlah resi yang diterbitkan sepanjang tahun tersebut sebanyak 57 resi.



## Gudang Jagung

**L**ebih jauh diutarakan Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, pada tahun 2011 ini pemerintah melalui Bappebti telah memprogramkan pembangunan sebanyak 15 gudang baru di lima provinsi. Masing-masing di Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Gorontalo. Di tahun 2010, pemerintah melalui APBN-P Kementerian Perdagangan juga sudah membangun gudang sebanyak 11 unit di 10 provinsi. Sedangkan di tahun 2009, Bappebti bersama dengan Pemerintah Daerah melalui Dana Stimulus Fiskal Kementerian Perdagangan juga telah melakukan pembangunan gudang SRG yang tersebar di 34 kabupaten pada 10 provinsi. Pembangunan gudang flat sebanyak 35 gudang akan digunakan untuk penyimpanan komoditi gabah dan beras, sedangkan 6 gudang silo untuk penyimpanan komoditi jagung di Kabupaten Garut, Sumenep, Minahasa Selatan, Takalar dan Gorontalo.

Dalam penjelasan yang disampaikan Sekretaris Bappebti, Nizarli, mengatakan, pemerintah akan membangun 15 gudang baru di lima provinsi dengan menggunakan dana alokasi khusus (DAK)

dari pemerintah. Nilai pembangunan masing-masing gudang itu bervariasi mulai dari Rp 4 miliar - Rp 6 miliar. DAK itu akan digunakan untuk membangun gudang berkapasitas sekitar 1.500 ton hingga 2.000 ton.

"Gudang baru yang akan dibangun sebanyak 15 unit itu akan dibangun dengan sarana lengkap, seperti sarana mesin pengering untuk mendapatkan hasil produksi dengan kadar air sesuai standar," kata Nizarli.

Gudang baru yang akan dikembangkan Bappebti di tahun 2011 dalam skema SRG itu, akan diprioritaskan pada komoditi jagung. Oleh karenanya lokasi pembangunan gudang itu dipilih di sentra-sentra produksi jagung.

"Karena 15 gudang baru itu berlokasi di sentra-sentra jagung, maka komoditas yang diincar adalah komoditi jagung. Sebelum ini kami fokus mengembangkan gudang untuk gabah," kata Nizarli.

Sampai saat ini, tambah Nizarli, komoditi yang diikutsertakan dalam pengembangan skema resi gudang adalah komodi pangan seperti gabah, jagung, dan beras. "Hingga saat ini, dari gudang yang sudah dioperasikan baru ada tiga jenis komoditi yang masuk dalam skema SRG. Pada hal, dari

kebijakan pemerintah ada sebanyak delapan komoditi yang layak masuk skema SRG."

Data yang dihimpun dari Bappebti, volume komoditi gabah yang diikutsertakan dalam skema resi gudang hingga tahun 2011 mencakup 6.839,82 ton dengan nilai Rp 26,30 miliar. Selain itu, untuk komoditi jagung mencapai 126,25 ton dengan nilai Rp 268,14 juta. Sedangkan komoditi beras mencapai 33 ton dengan nilai Rp 255,75 juta.

Sementara itu, Nizarli menjelaskan, saat ini pun sudah ada pengajuan dari pihak swasta untuk membangun gudang komoditi atau mengembangkan gudang yang dimiliki untuk diikutkan dalam skema SRG.

"Tentunya peran pihak swasta itu sangat diharapkan karena manfaat ekonomis SRG ini cukup besar. Terutama saat harga komoditi rendah di masa panen raya," jelas Nizarli.

Menurut Nizarli, pihak swasta yang akan mengembangkan gudang komoditi yang sudah menyampaikan proposal ke Bappebti mencakup komoditi kopi, kakao, dan lada.

"Untuk komoditi rumput laut saat ini sudah mulai diupayakan di NTT, dan diharapkan dalam waktu dekat gudang tersebut sudah bisa beroperasi," imbuh Nizarli. ▲

## REKAPITULASI RESI GUDANG TAHUNAN

TAHUN	PENERBITAN						PEMBIAYAAN			
	Resi Gudang		Komoditi				Jumlah RG	Nilai	% *)	Lembaga Keuangan
	Jumlah	% *)	Volume (ton)	% *)	Nilai Barang	% *)				
2008	16		508.83		Rp 1,431,616,200		6	Rp 313,900,000		BPRS Bina Amanah, BRI, Bank Jatim
2009	13	-19%	214.11	-58%	Rp 552,962,240	-61%	5	Rp 136,800,000	44%	BRI
2010	57	338%	2,299.94	974%	Rp 8,678,733,500	1469%	35	Rp 4,216,023,850	2982%	BRI, Bank Jatim, Bank BJB, Bank Kalsel, PKBL KBI, LPDB
2011 **)	103	81%	3,976.20	73%	Rp 16,163,569,000	86%	75	Rp 8,788,296,300	108%	LPDB, Bank Jatim, Bank BJB, Bank Kalsel, PKBL KBI
<b>TOTAL</b>	<b>189</b>		<b>6,999.08</b>		<b>Rp 26,826,880,940</b>		<b>121</b>	<b>Rp 13,455,020,150</b>		

Prosentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya  
 \*) Sampai dengan laporan ini dibuat

25 April 2011  
 Biro Pasar Fisik dan Jasa, BAPPEBTI

## PEMBIAYAAN SUBSIDI SISTEM RESI GUDANG (S-SRG)

NO	BANK PENYALUR	JUMLAH RESI GUDANG DIBIYAI S-SRG	NILAI PEMBIAYAAN S-SRG
1	Bank BRI	2	Rp 775,493,600
2	Bank BJB	24	Rp 2,192,206,250
3	Bank Kalsel	7	Rp 188,970,600
4	Bank Jateng	0	Rp -
5	Bank Jatim	15	Rp 1,626,520,000
<b>TOTAL</b>		<b>48</b>	<b>Rp 4,783,190,450</b>

25 April 2011  
 Biro Pasar Fisik dan Jasa, BAPPEBTI

## PEMBIAYAAN NON-BANK

NO	LEMBAGA PENYALUR	JUMLAH RESI GUDANG DIBIYAI	NILAI PEMBIAYAAN	KETERANGAN
1	LPDB Kem. KUKM	11	Rp 3,910,277,700	Bunga 6 %
2	PKBL PT KBI	17	Rp 1,568,383,250	Bunga 6 %
<b>TOTAL</b>		<b>28</b>	<b>Rp 5,478,660,950</b>	

25 April 2011  
 Biro Pasar Fisik dan Jasa, BAPPEBTI

## PEMBIAYAAN BANK BUNGA KOMERSIAL

NO	BANK PENYALUR	JUMLAH RESI GUDANG DIBIYAI	NILAI PEMBIAYAAN	KETERANGAN
1	BRI	7	Rp 296,800,000	Bunga 6 %
2	Bank Jatim	1	Rp 23,900,000	Bunga 6 %
3	BPRS Bina Amanah Satria	3	Rp 130,000,000	
<b>TOTAL</b>		<b>11</b>	<b>Rp 450,700,000</b>	

25 April 2011  
 Biro Pasar Fisik dan Jasa, BAPPEBTI

# KADIN Jatim Menimba Ilmu di Bappebti

Mengoptimalkan penyelenggaraan dan pemanfaatan Pasar Lelang Komoditi Agro (PLKA), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) saat ini tengah melakukan Revitalisasi Pasar Lelang. Sehingga diharapkan penyelenggaraan PLKA dapat berkembang lebih baik karena akan menjadi mandiri dan profesional. Program Revitalisasi ini dilaksanakan di 5 propinsi yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi Selatan.

Secara nasional penyelenggara PLKA yang tersebar di 19 provinsi, total nilai transaksi periode Januari hingga Maret 2011 telah mencapai sebesar Rp 237,7 milyar. Nilai transaksi itu sudah termasuk dengan penyelenggaraan PLKA Jatim yang dilakukan pada 22 Februari 2011. Dari penyelenggaraan itu, PLKA Jatim mencatatkan nilai transaksi sebesar Rp 80 miliar.

Penyelenggaraan PLKA Jatim di Puspa Agro Taman Sidoarjo, itu, merupakan langkah positif pemerintah daerah dalam merevitalisasi PLKA. Dan, sesuai dengan harapan Bappebti dalam merevitalisasi PLKA.

Demikian antara lain diutarakan Sekretaris Bappebti, Nizarli, dalam sambutannya pada kunjungan kerja KADIN Jatim, ke Bappebti, 28 April 2011. Pejabat Bappebti yang turut menyambut kunjungan KADIN Jatim itu, Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Sutriyono Edi, Kepala Biro Analisis, Ismadjaja Toeng-agie. Sedangkan KADIN Jatim, M Nafik H.R, sebagai ketua rombongan membawa anggotanya sebanyak 7 orang.

"Untuk mendorong pengembangan sistem resi gudang (SRG) dan Pasar Lelang di Jawa Timur yang dapat dimanfaatkan para petani, UKM dan pelaku usaha untuk meningkatkan nilai jual komoditinya, maka kami mengharapkan KADIN dapat bersinergi dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur," papar Nizarli.

Dalam kaitan itu, tambah Nizarli, KADIN Jatim antara lain dapat melakukan program sosialisasi pemanfaatan SRG khususnya bagi pedagang, pabrik dan eksportir. Di samping itu, mendorong pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang mendukung pemanfaatan SRG bagi pelaku usaha.

"Program yang tak kalah penting dari KADIN Jatim adalah ikut serta

mengembangkan komoditas unggulan daerah. Serta, optimalisasi pemanfaatan PLKA di Puspa Agro Taman Sidoarjo yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Propinsi Jawa Timur," jelasnya.

Di samping itu, Nizarli juga mengharapkan Bappebti dan KADIN Jatim bisa menjalin kerjasama yang erat guna pengembangan tiga Tupoksi Bappebti. Masing-masing Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang (PL).

Lebih jauh diutarakan Nizarli, guna mewujudkan ke tiga tupoksi tersebut, Bappebti memiliki misi. Yakni, pertama, mengembangkan PBK sebagai instrumen lindung nilai dan pembentukan harga yang transparan dan dapat dijadikan sebagai referensi harga. Perdagangan Berjangka dapat berfungsi sebagai sarana lindung nilai bagi pelaku usaha, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga komoditi.

"PBK adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka. Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia resmi mulai berjalan sejak Desember 2000 yang ditandai dengan beroperasinya bursa berjangka yang pertama yaitu PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Pada Tahun 2010, hadir pula PT. Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) yang merupakan bursa berjangka kedua di Indonesia."

Kedua, mengembangkan SRG sebagai alternatif pembiayaan yang mudah diakses oleh pelaku usaha terutama petani dan UKM. Dengan SRG pelaku usaha khususnya petani/UKM dapat meminjam di bank-nonbank dengan Komoditi hasil panennya tanpa dipersyaratkan agunan tambahan lainnya seperti surat berharga.

Sedangkan yang ketiga, kata Nizarli, mengembangkan PLKA sebagai mekanisme pembentukan harga yang transparan dan terbuka serta pemasaran produk hasil komoditi primer. PLKA merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan sistem lelang sehingga harga yang dihasilkan merupakan harga yang terbaik, wajar dan berkeadilan.

"Pasar Lelang dapat memperpendek mata rantai perdagangan

sehingga terciptanya efisiensi perdagangan, mendukung tumbuhnya perekonomian daerah/nasional dan sebagai sarana Pembentukan Harga," jelasnya.

Manfaat lain PLKA yaitu, perencanaan pola tanam yang baik oleh petani, mendorong petani berproduksi secara lebih baik, meningkatkan pendapatan petani, dan masyarakat dapat menikmati harga yang lebih kompetitif.

Ketiga Tupoksi Bappebti itu memiliki keterkaitan satu sama lain, yakni dengan melakukan penyimpanan komoditi dalam skema SRG dan diterbitkan resi gudang, pelaku usaha khususnya petani/UKM mendapatkan kemudahan akses pembiayaan dari bank/ lembaga keuangan non bank (LKNB) yang sangat dibutuhkan pelaku usaha/UKM untuk memenuhi kebutuhannya, membeli pupuk, bibit, membayar anak sekolah dan keperluan sehari-hari lainnya.

Selain itu pelaku usaha terutama petani/UKM juga dimudahkan dalam proses pemasaran komoditinya yakni pada saat mereka ingin menjual (saat harga bagus) atau resi gudang telah jatuh tempo, petani/UKM dapat menjual komoditinya secara langsung kepada pembeli atau melalui Pasar Lelang. Bagi pengusaha atau pelaku usaha skala besar, penjualan komoditi dapat pula dilakukan melalui bursa berjangka komoditi guna mendapatkan harga yang terbaik, wajar dan efisien.

Manfaat lain dari perdagangan berjangka komoditi yaitu para pelaku usaha dapat melindungi dirinya terhadap fluktuasi harga yang terjadi melalui kegiatan lindung nilai (hedging) di bursa berjangka, yaitu dengan melakukan transaksi di bursa berjangka dengan posisi yang berbeda dengan posisi di pasar fisik. Contoh, bila pelaku usaha di pasar fisik mengekspor CPO ke mancanegara dan akan dibayarkan 3 bulan ke depan. Untuk melindungi dirinya dari penurunan harga CPO, maka pelaku usaha tersebut disarankan untuk melakukan lindung nilai (hedging) di bursa berjangka. Dengan cara melakukan transaksi beli (short) sehingga 3 bulan kemudian apabila harga CPO turun dan rugi di pasar fisik, pelaku usaha tersebut masih untung di bursa berjangka.



## Produk berkualitas

Dalam melakukan penjualan komoditi di pasar lelang atau di bursa berjangka pelaku usaha termasuk petani/UKM sangat dimudahkan, murah, relatif aman serta menguntungkan. Karena pelaku usaha tersebut tidak perlu membawa komoditi mereka ke pasar lelang atau ke bursa berjangka, cukup dengan Resi Gudang sebagai underlying asset. Pelaku usaha pun mendapatkan harga terbaik, karena pasar lelang/bursa berjangka merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan sistem lelang terbuka sehingga harga yang dihasilkan merupakan harga yang terbaik.

Selain itu, tidak perlu menjual komoditinya pada saat itu juga bila komoditinya tidak laku terjual di pasar lelang atau di bursa berjangka. Dengan demikian akan terhindar dari beban biaya transportasi untuk membawa pulang komoditi tersebut. Karena pelaku usaha cukup membawa resi gudangnya ke pasar lelang.

Pasar lelang dan SRG memiliki peranan pula dalam mendorong agar pelaku usaha khususnya petani atau UKM menghasilkan produk-produk yang berkualitas. Karena

PLKA merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dengan sistem Lelang sehingga harga yang dihasilkan merupakan harga yang terbaik, wajar, efisien dan berkeadilan, selain itu dengan adanya pasar lelang di suatu daerah dapat mendukung interkoneksi

antar daerah dan dengan bertemunya penjual dan pembeli secara langsung maka pasar lelang dapat memperpendek mata rantai perdagangan atau dengan kata lain mengurangi biaya ekonomi tinggi.

Produk yang diperdagangkan di pasar lelang pun harus berkualitas dan memenuhi kuantitas tertentu sehingga dapat mendukung peningkatan daya saing produk, serta merupakan instrument pengamanan produk dalam negeri.

## Subsidi bunga

Nizarli juga mengutarakan, SRG merupakan instrumen pembiayaan yang penting dan efektif. Melalui SRG para petani, kelompok tani, koperasi, usaha kecil dan menengah dapat memperoleh kredit di bank- lembaga keuangan non bank (LKNB) hanya dengan menggunakan Resi Gudang tanpa diperlukan agunan- jaminan (fixed-asset). Pembiayaan kredit tersebut diperlukan bagi petani dalam menghadapi musim panen raya yang umumnya harga cenderung rendah. Pembiayaan melalui SRG ini dapat mendorong petani untuk terus melakukan budidaya secara berkelanjutan dengan hasil komoditi yang memenuhi standard SNI sehingga memiliki daya saing.

Dan untuk meringankan beban bunga bank dalam pemanfaatan SRG bagi Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi Tani, pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang pemberian subsidi bunga kredit resi gudang melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 171/

PMK.05/2009. Kebijakan itu diikuti Peraturan Menteri Perdagangan No. 66/M-DAG/PER/12/2009, tentang pelaksanaan skema subsidi resi gudang.

"Subsidi bunga itu hanya disalurkan melalui bank-bank pelaksana yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bank yang ditetapkan sebagai bank penyalur adalah Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank BRI dan Bank Kalsel. Melalui subsidi ini, beban bunga peserta hanya sebesar 6 % per-tahun. Sedangkan selisih tingkat bunga merupakan subsidi pemerintah," papar Nizarli.

Di sisi lain dijelaskan, SRG dapat dimanfaatkan tidak hanya oleh Petani/UKM tetapi juga para pelaku usaha seperti pedagang, eksportir dan prosesor atau pabrik. Resi Gudang dapat menambah cash flow guna meningkatkan modal kerja yang saat ini sudah dimiliki. Sedangkan bagi eksportir, Resi Gudang dapat berfungsi sebagai trade financing untuk melengkapi dokumen transaksi ekspor yang menggunakan Letter of Credit seperti invoice, bill of lading dan certificate of insurance sehingga menambah keyakinan importir dan issuing bank di luar negeri.

Di samping itu, melalui data yang terintegrasi antar daerah di manalokasi gudang yang tersebar di wilayah Indonesia, SRG menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mengukur ketersediaan pangan nasional. Sehingga dapat mendukung program Ketahanan Pangan Nasional. ▲

# Agenda



Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, menyampaikan sambutan saat Pelatihan Teknis Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi. Pelatihan ini diikuti sebanyak 65 orang peserta dari berbagai perusahaan pialang berjangka. Narasumber pelatihan itu antara lain, Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Robert J Bontaryo. Diakhir acara peserta berprestasi memperoleh sertifikasi dari Bappebti. Semarang, 30 Maret 2011,



Kepala Bappebti Syahrul R Sempurnajaya dan Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Robert J Bontaryo meninjau aktivitas perdagangan berjangka PT Fasting Futures dan PT Solid Gold Berjangka cabang Semarang, 30 Maret 2011.



Tim Bappebti terdiri dari Kepala Bagian Pengawasan dan Audit, Kepala Bagian Pengawasan Sistem Resi Gudang, dan Kepala Bagian Pelanggaran Administrasi, menghadiri FIA Clearing 2011. Forum tersebut dihadiri oleh para regulator, bursa, kliring dan pelakunya serta pihak-pihak terkait lainnya seperti ahli Lembaga Keuangan (bank) dari berbagai Negara untuk bertukar informasi dan membahas berbagai isu berkaitan dengan over the counter (OTC) clearing derivatives. New York, Amerika Serikat, 12 dan 13 April 2011



Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, menghadiri acara peluncuran perdana Kontrak Tunda Serah Emas GOLDUD dan GOLDID PT. BKDI. Acara tersebut juga di hadiri oleh para pejabat eselon II Bappebti, Komisaris dan Direksi BKDI, para pialang anggota dari BKDI dan juga media cetak. Jakarta, 11 April 2011



Kepala Bappebti, Syahrul R Sempurnajaya, dengan pembicara pendamping antara lain Kadis Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Grobogan, Moh. Thohirin, Direktur Pemasaran PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah, Basuki Sri Hartono, melakukan Dialog Interaktif di RRI PRO 2 Semarang yang disiarkan secara langsung, dengan tema Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai salah satu alternatif bagi pembiayaan. Pembicara Utama dalam dialog interaktif di Radio RRI PRO 2 Semarang, 13 April 2011.



Bappebti bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah melaksanakan acara Sosialisasi Sistem Resi Gudang, bertempat di Gedung Pendopo Kecamatan Wirosari Provinsi Jawa Tengah. Acara sosialisasi tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Grobogan, H. Icek Baskoro, Eselon II Bappebti, Pimpinan PT. Pertanian (Persero), Bank BRI, BPD Jateng, Pejabat Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di Jawa Tengah, pelaku usaha, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi, dan kalangan akademisi. 13 April 2011

# Tiga Bulan QF Harus Beroperasi

Bappebti telah mengembalikan izin operasi PT Quantum Futures (QF) sebagai perusahaan pialang berjangka anggota Jakarta Futures Exchange (JFX) atas tuntutan di tingkat Mahkamah Agung. Diberinya kembali izin itu dengan Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 1250/BAP-PEBTI/SA/03/2011, tertanggal 16 Maret 2011. Dengan surat keputusan itu, QF juga memiliki kewajiban selambat-lambatnya dalam tiga bulan sejak 16 Maret 2011, untuk kembali beroperasi.

Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka Bappebti akan mengam-

bil langkah dan tindakan sesuai kewenangan yang dimiliki untuk membekukannya kembali.

"Terhitung tiga bulan sejak surat izin operasi dikembalikan Bappebti kepada PT Quantum Futures, perusahaan itu harus beroperasi sesuai dengan aturan dan perundang-undangan perdagangan berjangka komoditi. Jika kesempatan yang diberikan itu tidak digunakan, Bappebti akan menggunakan kewenangan yang ada untuk mencabut izinnya," jelas Kepala Biro Perniagaan, Bappebti, Robert James Bintaryo.

Bappebti punya kewajiban untuk memenuhi tuntutan mereka melalui keputusan Mahkamah Agung, tambah Robert. Tetapi, Quantum juga punya kewajiban memenuhi kebijakan yang dimiliki Bappebti sesuai dengan kewenangan yang ada.

"Sejak Surat Keputusan Kepala Bappebti itu disampaikan kepada pihak Quantum, hingga saat ini belum ada laporan dari mereka. Kita harapkan dalam waktu dekat mereka akan melaporkannya, apa pun kondisinya," jelas Robert, diakhir April 2011, lalu.

# Pemda Tidak Serius, Dukungan SRG Dicabut

Telah selesainya pembangunan sebanyak 45 unit gudang sistem resi gudang (SRG) melalui dana Stimulus Fiskal Kementerian Perdagangan tahun 2009 dan 11 unit gudang SRG melalui dana APBN-P Kementerian Perdagangan tahun 2010, maka langkah penting selanjutnya adalah implementasi SRG di daerah-daerah lokasi gudang tersebut. Terkait itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) selaku badan pembina dan pengawas sesuai UU No.9/2006 tentang sistem resi gudang, baru-baru ini di Batam, melakukan pembinaan dan pertemuan teknis dengan pelaku SRG.

Pertemuan Teknis Pelaksanaan SRG tersebut merupakan salah satu wadah koordinasi dan penyiapan serta tindaklanjut dari langkah-langkah tek-

nis yang telah dan perlu dilakukan daerah terkait dengan pelaksanaan SRG sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada.

Kepala Bappebti, Syahrul R. Sempurnajaya, dalam sambutannya pada pertemuan teknis tersebut menyampaikan harapannya dan meminta komitmen dari pejabat pemerintah daerah selaku penyelenggara SRG untuk serius melaksanakannya.

"Kami minta pemimpin daerah harus bisa berjanji menggerakkan stakeholder yang ada di daerah itu untuk mengembangkan gudang SRG. Jadi, tidak hanya Dinas Perindustrian dan Perdagangan saja yang bekerja, melainkan juga instansi lain yang memiliki kepentingan sama dalam mense-

jahterakan rakyat petani," jelasnya.

"Dengan demikian kami akan bisa lihat daerah mana yang serius dan yang tidak serius. Kalau ada daerah yang tidak serius menjalankan SRG ini, akan kita tinjau ulang jenis bantuan yang akan diberikan pemerintah pusat. Tetapi kalau pemimpin daerahnya mau berkomitmen, akan kita dukung. Jadi jangan asal-asalan supaya kelihatan ada kegiatan pembangunan di daerah itu," tegas Syahrul.

Pertemuan teknis itu rutin diselenggarakan Bappebti sebagai ajang koordinasi dan komunikasi antara Bappebti, Pengelola Gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian dan Pusat Registrasi dengan para Pemerintah Daerah. Sehingga langkah-langkah penyiapan maupun pelaksanaan SRG akan lebih konkrit, terarah dan terukur.

# Pialang 'Tidur' Gunakan Pasal 96, PP No. 9/1999

Perusahaan pialang berjangka 'tidur' alias tidak aktif bertransaksi di bursa berjangka, baik akibat masalah internal manajemen maupun kurang mampu berkompetisi, disarankan untuk menghentikan sementara operasional perusahaan. Perusahaan pialang berjangka memiliki hak untuk menghentikan sementara aktifitasnya. Dengan penghentian sementara kegiatannya, yang diajukan pialang berjangka tidak diwajibkan memenuhi laporan pembukuan sebagaimana diwajibkan peraturan Bappebti.

Untuk penghentian sementara kegiatan perusahaan pialang berjangka diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9/1999, tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka, khususnya di Pasal 69.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah perusahaan pialang berjangka 'tidur' saat ini mencapai 30

persen.

"Dari berbagai informasi yang diperoleh, tidak aktifnya perusahaan pialang berjangka itu disebabkan banyak faktor. Diantaranya ada persoalan internal manajemen, dan ada pula akibat kurangnya kemampuan perusahaan pialang memasarkan kontrak berjangka," jelas Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Robert James Bintaryo.

Oleh karena itu, papar Robert, sebaiknya perusahaan pialang berjangka menggunakan haknya seperti yang diatur pada PP No. 9/1999, Pasal 69. "Untuk menghentikan sementara kegiatan pialang berjangka, manajemen cukup menyampaikan surat penghentian sementara aktivitas perusahaan kepada Bappebti."

Dengan demikian perusahaan pialang berjangka tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan

laporan bulanan terkait volume transaksi dan posisi keuangannya, tambah Robert.

"Dengan penghentian sementara itu, pihak manajemen bisa menggunakan waktu yang ada untuk konsolidasi atau menyusun strategi baru. Sehingga pada akhirnya perusahaan bisa lebih sehat dan beroperasi sesuai dengan aturan yang ada," tegas Robert.

Namun demikian, jelas Robert, dalam penghentian sementara aktivitas perusahaan itu, pialang berjangka tidak dibenarkan melakukan transaksi perdagangan berjangka. Apalagi bertindak malpraktik.

Menurut Robert, hingga saat ini belum ada perusahaan pialang berjangka yang menggunakan hak itu. Tetapi dalam waktu dekat ini, Bappebti akan mendata kembali dan mempertanyakan keseriusan mereka di industri ini.

# PFI Transaksikan Kontrak PALN

Phillip Futures Indonesia (PFI) menjadi perusahaan pialang berjangka pertama yang melakukan transaksi dalam sistem penyaluran amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri (PALN) dari Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). Transaksi perdana PLAN yang disaralkan PFI terlaksana pada 18 Maret 2011, lalu. Dalam transaksi PALN itu, PFI menawarkan kontrak berjangka komoditi dari bursa berjangka yang terbagung pada Chicago Mercantile Exchange (CME) Grup.

"Kami sudah menyalurkan amanat nasabah dari dalam negeri untuk transaksi PLAN di NYBOT, salah satu bursa CME Grup. Kontrak berjangka yang pertama kali ditransaksikan adalah kontrak gula," ungkap Riswan J. Bunaidy.

Menurut Riswan, PFI saat ini menawarkan kontrak berjangka PALN sebanyak 13 kontrak berjangka komoditi. Kontrak berjangka PALN itu semuanya dis-

alurkan pada bursa berjangka yang berada di bawah payung CME Grup. Hal itu dikarenakan PFI anak usaha Phillip Futures yang berbasis di Singapura merupakan anggota pialang dari CME Grup.

"Pada dasarnya ada banyak kontrak berjangka komoditi yang ditawarkan CME Grup. Tetapi menurut kajian PFI, 13 kontrak berjangka yang ditawarkan untuk skema PALN itu relevan dengan pelaku usaha Indonesia," jelas Riswan.

Dengan keberhasilan transaksi PALN itu, tambahnya, kami cukup optimis bahwa pelaku usaha di Indonesia juga berminat bertransaksi di bursa berjangka komoditi. Karena diketahui pelaku yang bertransaksi untuk kontrak sugar-gula itu, adalah pelaku lama yang menjadi investor di Phillip Futures, Singapura.

"Pada dasarnya, keberhasilan

transaksi di bursa berjangka itu adalah edukasi dan sosialisasi. Seperti investor yang bertransaksi kontrak gula itu, sudah merupakan pemian lama. Ketika diketahui bahwa Phillip Futures juga punya cabang di Indonesia, transaksinya dialihkan ke PFI," kata Riswan.

Sementara itu, menurut Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Robert J. Bintaryo, mengatakan, hingga saat ini baru pialang anggota BKDI yang melakukan transaksi PALN. Sedangkan pialang berjangka yang menjadi anggota JFX belum ada satu pun yang mengajukan permohonan transaksi PALN.

"Pada dasarnya Bappebti menunggu permohonan dari perusahaan pialang untuk transaksi PALN. Karena sesuai aturannya, setiap perusahaan pialang wajib memperoleh ijin untuk transaksi PALN," jelas Robert.

## Harga CPO Naik, TBS Turun

Dalam satu sesi perdagangan crude palm oil (CPO) di Malaysian Derivatives Exchange (MDX) mengalami penurunan harga. Kontrak CPO untuk pengiriman Mei ditutup pada level harga RM3367 per ton dari harga sebelumnya RM3412 per ton.

Penurunan harga CPO itu terjadi karena kekhawatiran turunnya ekspor Malaysia. Ekspor CPO Malaysia pada bulan April ini diperkirakan turun 7,7 % menjadi 865.593 ton. Sementara itu, jumlah produksi CPO Malaysia diperkirakan mengalami peningkatan sekitar 29,4 % menjadi 1,42 juta ton pada Maret lalu. Peningkatan produksi ini merupakan yang terbesarnya sejak Juni 1999.

Dari dalam negeri, harga CPO yang diperdagangkan di Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) untuk penyerahan guat sebesar Rp 205 per kg atau berada pada level harga Rp. 9.830 per kg.

Pada periode yang sama, harga CPO di pasaran Sumatera Selatan berada pada level harga Rp 7.383,75 per Kg. Atau, terjadi kenaikan dibandingkan periode sebelumnya yang berada pada kisaran Rp 7.193,13 per kg.

Perkembangan harga CPO di wilayah Sumatera Selatan umumnya mengacu pada perkembangan harga di tingkat internasional. Karena sebagian besar hasil olahan dari buah kelapa sawit itu diekspor ke sejumlah negara konsumen. Sedangkan sebagian lagi diolah sendiri hingga menjadi minyak goreng curah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

### TBS

Sementara itu, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit produksi petani

plasma di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, pada akhir April 2011 berada pada posisi Rp 1.453 per Kg. Harga TBS itu turun dibanding bulan Maret yang berada pada Rp 1.588 per Kg. Harga tersebut merupakan ketetapan periode 1-30 April 2011, yakni Rp1.453 per Kg atau turun Rp 135 dari bulan lalu Rp 1.588 per Kg.

Sementara indeks Maret yang merupakan pembagian hasil penjualan TBS setiap Kg yang diterima perusahaan untuk biaya pengolahan dan pemasaran CPO serta biaya penyusutan pabrik ditetapkan 80,28 persen. Atau turun dibanding periode sebelumnya yang berada pada 81,33 persen. Turunnya harga TBS itu karena pengaruh penjualan minyak sawit mentah di pasar dalam negeri yang mengalami penurunan sebelumnya Rp 7.246 per Kg, menjadi Rp 6.926 Kg. ▲

## Cuaca Buruk Harga Rumput Laut Surut

Akibat dampak cuaca buruk, harga Rumput Laut dibeberepa sentra produksi mengalami penurunan harga. Harga Rumput Laut produksi petani di Desa Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, dalam setahun terakhir ini, turun dari Rp 11.000 per Kg menjadi Rp 6.000 per Kg. Rumput Laut yang dibudidayakan para petani di daerah, itu merupakan jenis spinosum. Jenis Rumput Laut ini merupakan jenis yang langka dibudidayakan oleh petani Rumput Laut.

Sementara itu, harga Rumput Laut dari Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, juga anjlok di pasaran. Hal ini diduga

akibat kualitas yang mengalami penurunan menyusul dampak pencemaran Laut oleh tumpahan minyak. Dampak pencemaran itu membuat hasil panen mengalami perubahan warna fisik. Warna Rumput Laut menjadi kekuningan. Sehingga, Harga Rumput Laut mengalami penurunan harga dari semula Rp 13.000 per Kg menjadi berkisar Rp 6.000 - Rp 7.000 per Kg.

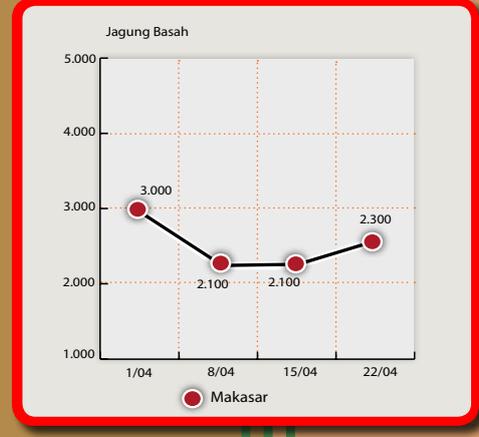
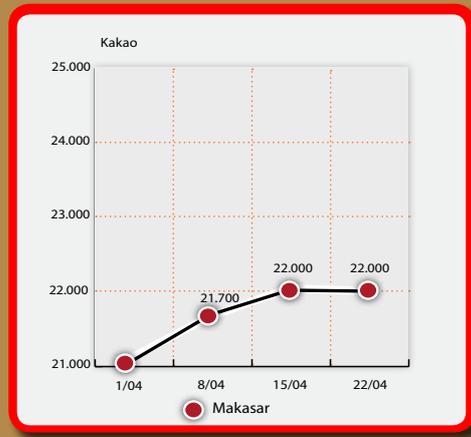
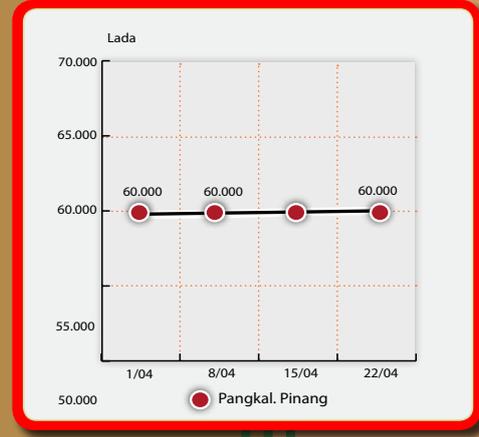
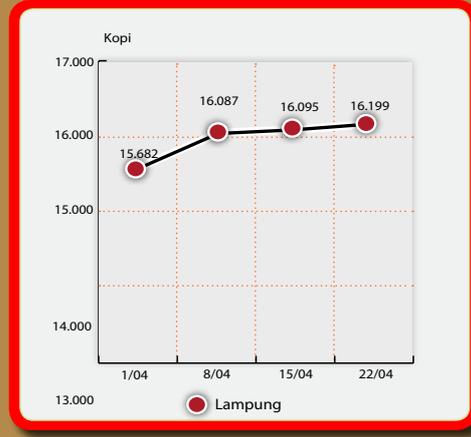
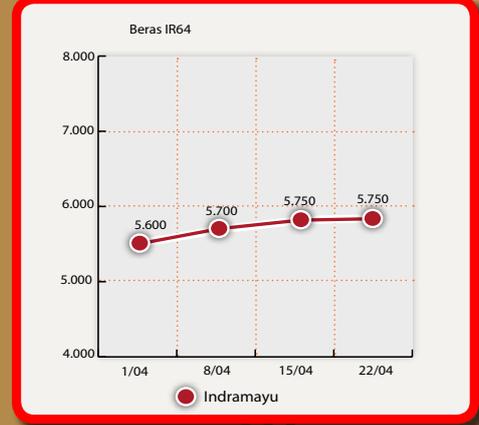
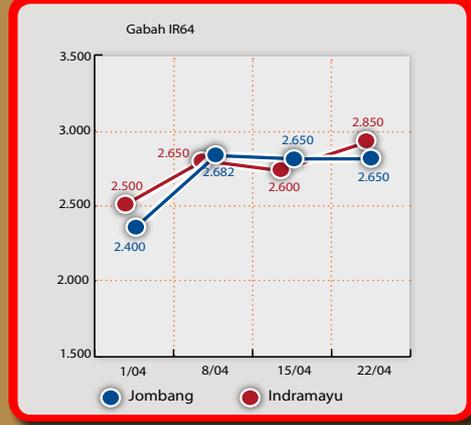
Di sentra Lampung, harga Rumput Laut basah berkisar pada

level harga Rp 8.000 - Rp 10.000 per Kg. Sedangkan harga Rumput Laut kering Rp 25.000 per Kg. Rumput Laut di daerah Lampung sebagian besar dipasok dari wilayah Kalianda Lampung Selatan.

Sementara itu, musim angin utara yang melanda perairan di wilayah perairan Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, juga mempengaruhi kualitas Rumput Laut. Musim angin utara mengakibatkan air laut menjadi keruh oleh hanyutan lumpur. Sehingga kualitas Rumput Laut menjadi rendah dan berpengaruh pada harga jual. ▲



Harga Komoditi (Rp/Kg)



# Minyak Cendana 'Emas Cair' Indonesia

Tanaman Cendana memiliki sejarah yang panjang dalam peradaban manusia. Kayu Cendana cukup banyak digunakan dalam berbagai ritual tradisional atau keagamaan Bhuda dan Hindu. Hal itu dapat diketahui dari manuskrip Cina, yang menggunakan kayu Cendana sebagai bahan patung atau ukiran para dewa suci. Bangsa Mesir kuno juga mengimpor kayu Cendana dan digunakan dalam pengobatan, pembalseman dan pembakaran ritual untuk menghormati para dewa.

Minyak Cendana salah satu produk yang dihasilkan dari kayu Cendana merupakan komoditi yang bernilai tinggi sejak ribuan tahun lalu. Minyak Cendana juga digunakan dalam berbagai ritual keagamaan di Mesir, India, Cina dan belahan bumi lainnya. Hal ini disebabkan aromanya yang cukup sensasional dan membuat nyaman bagi yang menghirupnya. Karenanya minyak Cendana dianggap sebagai minyak suci dan berwarna kekuning-kuningan itu juga dikenal sebagai 'emas cair'.

Dewasa ini, tanaman Cendana yang cukup dikenal dan dicari di mancanegara adalah kayu Cendana yang berasal dari India, Australia, Indonesia dan beberapa dari Kepulauan Pasifik. Di negara-negara produsen itu, kayu Cendana merupakan kayu yang sangat langka dan terancam punah. Hal itu antara lain karena tingginya nilai kayu Cendana diperdagangkan secara ilegal. Di sisi lain, kayu Cendana yang berkualitas tinggi bisa dipanen setelah berumur lebih dari 50 hingga 80 tahun.

Dari berbagai penelitian yang dilakukan para ahli botani, tumbuhan Cendana memiliki banyak jenis. Setidaknya terdapat 22 jenis kayu Cendana ditemukan dimuka bumi ini. Dari berbagai jenis itu, kayu Cendana yang terdapat di daratan India, Indonesia dan Australia merupakan kayu Cendana yang diburu di mancanegara. Karena kualitas kayunya yang cukup baik, aroma kayu yang ditularkan bisa mencapai ratusan tahun.

Kayu Cendana dari India atau dikenal dengan santalum album tum-

buh di wilayah barat Ghats dan beberapa pegunungan lainnya seperti Kalrayan dan Shevaroy Hills. Walau pun pohon-pohon Cendana di India dan Nepal adalah milik pemerintah dan panen mereka dikendalikan, banyak pohon ditebang secara ilegal. Hal itu dilakukan untuk memperoleh minyak Cendana yang nilainya cukup mahal. Di pasaran India, harga minyak Cendana perkilogram mencapai 1.000 hingga 2.500 dolar Amerika.

Cendana Australia atau santalum spicatum telah digunakan masyarakat lokal sebagai aromatherapists dan parfum sejak abad 17. Pada tahun 1840-an, diketahui Australia merupakan pengeksport terbesar kayu Cendana. Sedangkan minyak Cendana dari Australia mulai diekspor sejak tahun 1875.

Di Indonesia tanaman Cendana jenis santalum album atau yang sama dengan di India, bisa ditemui di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penyebarannya antara lain di Pulau Timor, Sumba, Alor, Solor, Pantar, Flores, Roti, dan pulau-pulau lainnya. Selain di NTT, Cendana juga bisa ditemui di daerah Gunung Kidul, Imogiri, Kulon Progo, Jateng dan Bondowoso, Jatim, dan Sulawesi. Kondisi ideal untuk tumbuhnya tanaman Cendana berada pada ketinggian 50 - 1200 meter dari permukaan laut, dan dengan curah hujan 625 - 1625 mm per tahun.

Populasi tanaman Cendana di Indonesia juga sudah dikhawatirkan punah karena penebangan secara liar dan perdagangan ilegal. Oleh karenanya, Pemda NTT saat ini mengambil kebijakan baru untuk mengembangkan dan mengembalikan masa kejayaan

kayu Cendana NTT.

Tanaman Cendana merupakan komoditi yang potensial bagi perekonomian masyarakat sekitar. Nilai ekonomi yang tinggi dari kayu Cendana antara lain dihasilkan dari kandungan minyak (santalo) yang beraroma wangi. Minyak Cendana dihasilkan dari hasil penyulingan kayu, dan digunakan sebagai bahan obat-obatan dan bahan minyak wangi atau parfum.

Kayu limbah penyulingan juga masih bisa dipergunakan sebagai bahan industri kerajinan seperti ukir-ukiran, patung, kipas, tasbih, dan lain-lain. Harga kerajinan Cendana ini juga cukup menggiurkan. Karena, pamor kerajinan Cendana biasanya dikoleksi oleh mereka yang berkelas.

Minyak Cendana produksi Indonesia banyak diekspor ke Eropa, Amerika, China, Hongkong, Korea, Taiwan dan Jepang. Sedangkan produk kerajinan dari kayu cendana banyak untuk konsumsi dalam negeri.

Cendana atau Cendana wangi, merupakan pohon penghasil kayu Cendana dan minyak Cendana. Kayunya digunakan sebagai rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, serta sangkur keris (warangka). Kayu yang baik bisa menyimpan aroma Cendana selama berabad-abad.

Kayu Cendana wangi- santalum album kini sangat langka dan harganya sangat mahal. Sebagai gantinya, sejumlah pakar aromaterapi dan parfum menggunakan kayu Cendana jenggi atau sandalum spicatum. Jenis kayu Cendana ini banyak ditemukan di Australia. Kedua jenis kayu ini memang berbeda konsentrasi bahan kimia yang dikandungnya, dan oleh karena itu kadar harumnya pun berbeda. ▲



# CENDANA ANTISEPTIK PERCANTIK KULIT

Komoditi

Minyak esensial cendana diperoleh setelah distilasi fraksional. Telah digunakan dalam Ayurveda selama berabad-abad. Kayu pahit, pendinginan, sedative dan tonik jantung. Hal ini sangat berguna dalam menangkap sekresi atau pendarahan. Minyak cendana juga sangat terkenal untuk itu sifat antiseptik dan menenangkan. Selain sebagai antiseptik minyak cendana juga bisa digunakan sebagai pengobatan alternatif, seperti dibawah ini;



**Gangguan kelamin:** serbuk cendana dicampur dengan susu dan campuran dapat dimodifikasi ke pil karena membantu penyembuhan gonore. Cendana juga digunakan dalam menyembuhkan disuria dan cystitis. Pada tahap awal memerlukan waktu sekitar lima tetes minyak cendana dan kemudian secara bertahap meningkatkan tingkat untuk 1-30 tetes.

**Kembung Lambung:** untuk menghilangkan kembung lambung, larutkan bubuk cendana ke madu lalu diminum dengan demikian asupan infus ini akan membantu untuk menyingkirkan masalah lambung.

**Penyakit kulit:** cendana juga dapat digunakan untuk hampir semua jenis penyakit kulit. Tidak memiliki efek samping pada setiap jenis kulit dan sangat cocok untuk hampir semua jenis kulit. Penerapannya pasta cendana dioleskan pada kulit yang bermasalah. Selain itu, pasta cendana sangat membantu untuk warna kulit dan mengembalikan kesehatan kulit.

**Obat jerawat:** campurkan satu sendok teh bubuk cendana ke satu sendok makan bubuk kunyit. Campur bubuk dengan jumlah sedikit air dan menjadikannya sebagai pasta. Lalu oleskan adonan itu pada bagian jerawat disaat hendak tidur malam dan biarkan hingga pagi hari. Saat mencucinya di pagi hari dengan air hangat. Untuk mendapatkan efek dingin, adonan tadi bisa menambahkan sejumlah kapur barus.

**Alergi kulit:** kulit akan terpengaruh untuk berbagai macam alergi, hal itu bisa terjadi karena terkontaminasi air, udara, makanan dan bahkan sinar matahari. Untuk mengatasinya, bubuk cendana dicampur dengan bubuk kunyit lalu ditambahkan satu sendok teh perasan jeruk nipis. Kemudian dioleskan pada kulit yang terkena alergi, biarkan selama sekitar 30 menit dan dicuci dengan air.

**Minyak cendana:** Pijat tubuh dengan minyak cendana dapat memperlhalus dan melembutkan kulit. Minyak cendana meresap ke dalam kulit dan memelihara sel-sel kulit dari dalam.

**Obat gigitan serangga:** digigit serangga sangat menjengkelkan, dan kerap meninggalkan bengkak pada permukaan kulit. Untuk mengatasinya, campurkan satu sendok makan bubuk kayu cendana dengan satu sendok teh bubuk kunyit dan cairkan dengan susu atau air hingga seperti pasta. Lalu dioleskan pada daerah yang terkena gigitan serangga, dan dalam beberapa menit saja akan mendapatkan rasa yang lega.

## Foreign investor develops downstream industry of CPO.

Three foreign investors; Ferrostaal from Germany, Gianazza Engineering from Italy, and Protect & Gamble have submitted their interest for investing in downstream sector of crude palm oil (CPO) in Indonesia. The areas that have been chosen to develop the downstream industry of CPO are Sei Mangke, Maloy, and Dumai.

For that investment, the three investors have done feasibility study and have submitted the proposal to the government. The fund estimation for development investment of that downstream industry of CPO is 80 trillion rupiahs.

The director general of agricultural & Chemical Industry of Industrial Ministry, Benny Wachyudi, said that those companies have submitted letter to the government in regards to their investment interest.

"It has been estimated that the investment needs for downstream of CPO in that three industrial areas is 80 trillion for

the next 4 years." Benny expressed.

"I have received the letter for visiting permit, including from Protect & Gamble who is interested investing in bio chemistry and oleo chemistry." He explained.

Previously, other investor such as PT Perkebunan Nusantara III has submitted their interest for investing in Sei Mangke. Then there is Wilmar Group who planned to establish CPO processing factory in Dumai and also East Kalimantan local government who is interested investing in Maloy.

For the three new investors, Benny still couldn't predict the investment point that can be realized as it's still early to talk about investment commitment. In regards to the investment activity, that three investors might choose downstream industry sectors of CPO that has been pioneered by government in those three areas. The pioneered sectors are oleo chemistry industry, butter, cooking oil, shortening, cocoa butter substitute, and meth-

anol.

The government will start establish the downstream industry area of CPO in three areas; Sei Mangke industrial area in North Sumatra, Dumai industrial area in Riau and Maloy Industrial area in East Kalimantan in 2011 - 2014. Last year, the Industrial Ministry has finished the feasibility study, detailed engineering design, business plan and environmental impact analysis for the downstream industry of CPO development in those areas. The ministry also mentioned that the establishment in that area approximately will require 80 trillion rupiahs for investment fund. That fund will be used to establish basic infrastructure such as railways, trains, port, electricity generator, water installation, and research.

"To encourage the investor's interest for investing in that area, government will give tax allowance as fiscal incentive. Besides that, the government will give disincentive for raw materials export. And for the downstream product, the export fee will be smaller than raw materials export fee." Benny Wachyudi said. ▲

## Traditional Market revitalization spent 505 billion.

The trading ministry in 2011 allocated 505 billion for traditional market revitalization budget. From that budget, there are 120 traditional markets that will be revitalized and 10 markets of that will be the pilot markets. That revitalization program will be a continuous program as 95 percent of 4000 existing traditional markets are in the inappropriate condition.

"Up until now in our record the market for revitalization is only 30 percents from the total of traditional markets in Indonesia. Therefore this revitalization will be a continuous program. This year there are 120 markets to be renovated and 10 out of them are pilot markets." Maria Elka Pangestu said recently after visiting Grabag Market in Purworejo Jateng.

The existing traditional markets are in the inappropriate condition, as most of them are above 20 years old. Those markets are built in New Order era as a part of Presiden-

tial Instruction project. To revitalize 10 pilot markets in 10 areas, government poured 88 billion for the budget.

"The budget for Grabag market is 5 billion. Next year we are hoping that the budget allocation is higher. The traditional market revitalization depends on the region's commitment. The region with higher commitment will get the budget faster," Marie said.

According to Marie, traditional market revitalization is very important to remove the dichotomy of modern market and traditional market. The traditional market need to be renovated, physically or in management sector.

To protect traditional market, each area needs to issue local regulation that manages minimarket zoning. Besides that, Marie Pangestu also warned local government to avoid extreme problem when moving the trader to the new

market. "We can avoid it with prioritizing the existing trader to get the selling venue. Other than that, the waste and goods distribution management needs to be remembered as well." She said.

"We are not only thinking about its physical appearance but also its managerial aspect, its efficiency and we are not only doing this for one year then we stop & leave it. We want to run the efficiency & managerial programs continuously & developing the market for the next 3 years.

"This year 2011 is the first year for Trading Ministry to do revitalization and for sure we can't do this without commitment from local government, local community leaders, and also from traders and market managers." Marie Pangestu added. ▲

## Commodity futures contract development strategy

Coftra is encouraging futures exchange to create and offer commodity futures contract with mini specification. With that mini contract, middle income people will be able to transact in future exchange. Besides that, future exchange has to introduce commodity futures trading industry to colleagues in early stages by work together to establish future exchange corner around the campus.

"We will encourage the future exchange to create and offer commodity futures contract with mini specification. With that mini contract, middle income people will be able to transact, including the housewives. This strategy has been done by PT Antam when they threw the gold to the market by working together with the pawnshop." Coftra Chief, Syahrul R Sempurnajaya explained.

That strategy is quite working, Syahrul

added, because many housewives who bought Antam's gold at the pawnshop then pawned that gold physical at the pawnshop. So they got many advantages from it.

"Nowadays, each futures brokerage company has their own commodity division. Therefore, we also asked future exchange to have experts or consultant in commodity futures." Syahrul emphasized.

If we don't have local expert in commodity, we can invite foreign experts. India's future exchange also did that. Therefore India could develop their commodity futures trade industry shortly, he added.

After I reviewed and examined, Syahrul added further, what people needs nowadays is education. Especially in commodity futures trade, I saw that the education needs to be done continuously. And

this education is not only for people as investor but also for futures Brokerage Company. Just like how the brokerage firm teaches their marketing staff to be able to throw future exchange to the market and also following all the rules and do a healthy competition between the future brokerage companies. Another important step and needs to be taken to introduce commodity futures trading to people is to introduce it at early stage. Especially to the colleagues because they are the one who will come into this industry.

"That's why we will support futures exchange to establish exchange corner around the campus. I will give my support if commodity futures trading become one of the lectures in university." Syahrul R Sempurnajaya said. ▲

## Driving the development & increasing the competitiveness.

Trading sector development needs to be done continuously through planning process synchronizations and the effort of balancing the perception and movement from all trading stakeholders. The trading sector is wished to be the pioneer of growth and the booster of competitiveness.

The trading Minister Mari Elka Pangestu said that in 2011 Trading Ministry working meeting. The working meeting was held on the 10th - 12th of March 2011 in Jakarta. The theme for the meeting is "Trading as development driving sector; Encouraging Trading Value Added & Sustainable to boost economical competitiveness."

The trading ministry working meeting was opened by Hatta Rajasa, the Economy Coordinator Ministry with echelon I, II and III of Trading Ministry, WTO ambassador, Trading attaché, Indonesian Trade and Promotion Centre (ITPC) Chief,

Head of the regional office in charge of Trading & Industry, and representation of other relevant agencies as the participants.

Marie Pangestu said that this year working meeting is a forum that needs to be used to discuss target plan for trading sector in 2011. And also formulating support that can be given by the region in order to drive the development and boost the competitiveness.

"Other than that, this forum also can be used to develop the network between central government, local & overseas Trading Ministry representation, and specially business world in Indonesia."

"Coordination, synchronization, and consultation with all lines are the ways that we were doing to encounter all problems." Marie Pangestu said.

She also said further that the trading regional office is very required for contributing by giving

price data and the amount of region staple production to support Early Warning System program. Therefore we can anticipate the price volatility.

On the other hand, Coftra Chief, Syahrul R Sempurnajaya, in his description on the working meeting explained that futures trading sector main focus is to optimize futures trading and auction market role. And also warehouse development and optimizing Warehouse Recited system role, increasing permit and information service.

Another important side as said by Syahrul is the harmonization of futures trading policy, auction market and warehouse receipt system. ▲

# Keberhasilan Kontrak Berjangka

**\*) Pantas Lumban Batu, Staf Bappebti**

Ada beberapa pendapat mengatakan bahwa syarat keberhasilan suatu kontrak berjangka komoditi diperdagangkan di bursa sangat tergantung dari kondisi ekonomi suatu negara. Di sisi lain, ada juga yang mengatakan, keberhasilan atau gagalnya suatu kontrak berjangka sangat ditentukan oleh kondisi setempat. Bisa saja satu kontrak berjangka likuid di satu negara tetapi tidak demikian di negara lain. Namun belum ada bukti yang memastikan bahwa setiap kontrak komoditi memenuhi persyaratan yang ditetapkan akan likuid atau sukses, apabila faktor-faktor yang menentukan tidak dipenuhi.

Dari berbagai kajian, ada beberapa faktor penting yang menjadi pertimbangan dasar minimal atau fundamental bagi keberhasilan suatu kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa. Faktor-faktor keberhasilan itu antara lain ditentukan, seperti dijelaskan di bawah ini.

1. *Ketersediaan komoditi dalam jumlah yang cukup banyak.* Banyaknya produksi dan banyaknya konsumsi yang cukup besar atas suatu komoditi merupakan faktor utama ramainya suatu pasar. Volume komoditi di pasar fisik sangat berpengaruh terhadap volume transaksi di pasar berjangka. Hal ini juga akan mempunyai implikasi terhadap likuiditas pasar yang mendorong investor maupun hedgers melakukan transaksi. Selain itu tidak ada kekhawatiran apabila kontrak berjangka jatuh tempo untuk menerima penyerahan barang.

Dengan keaktifan investor dan hedger dalam bertransaksi sangat mempengaruhi keadaan pasar. Likuidnya pasar cukup mempengaruhi terhadap jumlah pembeli dan penjual sekaligus menjamin mekanisme pembentukan harga. Pasar yang likuid sering tidak cukup merupakan alasan utama, disebabkan oleh kontrak-kontrak yang baru terutama bagi negara-negara sedang berkembang, tetapi juga banyak faktor yang mendukung terciptanya sarana perdagangan yang kondusif.

2. *Komoditi yang diperdagangkan homogen.* Komoditas yang diperdagangkan secara bebas serta memiliki karakteristik homogen. Sehingga tidak terdapat monopoli atau oligopoli. Komoditi yang diperdagangkan dengan sendirinya dapat dibagi dalam beberapa karakter yaitu komoditi yang bermanfaat, diperjual belikan secara bebas, mempunyai standar mutu, tersedia dan dapat disimpan dalam waktu tertentu serta mempunyai discount atau premi dalam tingkat penyerahan mutu yang berbeda. Dalam hal ini dapat mewakili produk yang sama baik dari segi ukuran kontrak perdagangan harus cukup besar dan dapat menampung para pengguna dan pedagang serta cukup menarik bagi para spekulator, produser dan prosesor.

3. *Kebutuhan para pelaku pasar.* Adanya kebutuhan (need assesment) mengenai pengelolaan risiko harga dari dunia usaha, khususnya usaha dibidang komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka dan perkembangan likuiditas pasar yang ditandai dengan banyaknya pelaku pasar baik sebagai hedger, investor. Pembeli maupun penjual dan tidak ada yang memiliki posisi dominan yang dapat menguasai atau mengendalikan pasar. Kebutuhan para pelaku pasar untuk mentransaksikan komoditi tersebut sesuai dengan mekanisme pasar. Kebutuhan hedger adalah untuk lindung nilai dengan meminimalisir risiko dari fluktuasi harga yang bisa dialaminya dan kebutuhan dari investor adalah dengan memanfaatkan pergerakan harga untuk mencari keuntungan.

4. *Harga komoditi berfluktuasi.* Harga komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka mempunyai ciri berfluktuasi. Terjadinya fluktuasi harga adalah merupakan gambaran dari besarnya supply dan demand terhadap komoditi tersebut. Kalau para petani atau produsen menginginkan harga naik, akan tetapi konsumen, prosesor atau pabrikan serta eksportir menginginkan harga bahan baku turun.

Pada saat harga berfluktuasi para pelaku pasar dapat mengambil posisi jual atau beli kontrak berjangka, karena pada harga turun atau naik dapat diperoleh keuntungan asalkan fluktuasi harga tersebut dianalisa dengan baik. Para investor yang bersedia mengelola risiko akan memanfaatkan fluktuasi harga ini sebagai dasar analisa untuk memperoleh keuntungan.

5. *Kemudahan masuk atau ke luar pasar.* Pembeli atau penjual harus dapat dengan mudah untuk masuk atau ke luar pasar. Kemudahan untuk masuk atau ke luar pasar, persyaratan margin yang tidak memberatkan dan tersedianya sistem kliring yang kuat. Mekanisme transaksi di bursa berjangka ini seperti offset harus dengan partner bisnis. Karena fungsi ini diwakili oleh kliringhouse sebagai pengganti untuk menyelesaikan setiap transaksi dalam kegiatan perdagangan berjangka, baik sebagai pembeli maupun penjual.

6. *Cukup banyak pembeli dan penjual.* Struktur perdagangan berjangka yang didukung peserta pasar yang independen. Campur tangan secara vertikal yang besar dari pada kelompok perusahaan pengguna bursa seharusnya tidak terlalu dominan, sebaliknya di sini perusahaan akan dapat menciptakan suatu kemungkinan manajemen resiko yang dapat menyediakan terciptanya pembentukan harga sebagai tujuan dari pada kegiatan bursa. Struktur pasar oligopoli atau pasar monopoli akan menjadi kendala

terjadinya transaksi di bursa.

7. *Tidak ada integrasi vertikal.* Para pelaku pasar tidak terintegrasi secara vertikal dalam bisnis komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka. Suatu integrasi vertikal yang tinggi antara produksi dan pengolahan komoditi akan menghalangi terbentuknya suatu kontrak berjangka yang aktif. Karena harga ditetapkan dalam intern perusahaan dari hulu sampai ke hilir. Penguasaan suatu perusahaan terhadap komoditi dapat menyebabkan timbulnya monopoli perdagangan dan mempengaruhi pasar secara langsung baik permintaan maupun penawaran.

8. *Tidak ada intervensi pemerintah.* Pasar harus mempunyai keyakinan bahwa dalam kegiatan perdagangan berjangka, pemerintah tidak akan campur tangan dalam mekanisme pembentukan harga. Di sisi lain, para pelaku perdagangan berjangka mempunyai kepercayaan bahwa instansi yang mewakili pemerintah harus netral dan tidak memihak kepada suatu kelompok tertentu. Hal ini terutama dalam menangani perhitungan supply dan demand serta tingkat bunga komersial. Demikian juga dalam penetapan harga tidak ada campur tangan pemerintah. Menentukan harga adalah kekuatan supply dan demand dari para pelaku pasar.

Jadi peranan pemerintah dalam perdagangan berjangka hanya melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap para pelaku pasar agar berjalan secara tertib dan teratur serta terlindungi.

9. *Partisipasi investor.* Partisipasi investor sangat signifikan dalam meningkatkan likuiditas transaksi suatu kontrak berjangka. Tanpa likuiditas yang cukup banyak dalam suatu kontrak yang diperdagangkan, maka investor akan enggan untuk memasuki suatu pasar karena kemudahan melikuidasi posisi berkurang. Pada saat investor melikuidasi posisinya, mereka memerlukan partisipasi yang lain untuk mengambil posisi sebaliknya. Apabila jumlah peserta di bursa sedikit akan berakibat sulitnya melikuidasi posisi. Sehingga tidak menarik untuk investor yang ingin masuk atau ke luar dari suatu posisi yang ditransaksikannya.

10. *Mekanisme penyerahan terjamin.* Komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka harus dapat disimpan dalam waktu tertentu dan tersedia fasilitas gudang sebagai tempat penyimpanan barang dan tempat penyerahan barang dari kontrak yang telah jatuh tempo. Khusus untuk komoditi yang tidak mungkin disimpan harus ditetapkan ketentuan penyerahan pada terminal tertentu, penyelesaian secara tunai atau harga penyerahan berbeda-beda sesuai ketentuan yang ditetapkan setiap lokasi. Dalam kontrak juga harus ditentukan bulan penyerahan, tempat penyerahan pada umumnya di pelabuhan ekspor. Namun, kebanyakan kontrak berjangka diselesaikan melalui perhitungan keuangan (cash settlement).

11. *Menarik bagi hedger.* Jumlah satuan dalam kontrak harus dapat mengakomodasikan kebutuhan pedagang besar juga partisipasi produsen, prosesor, pedagang kecil, pemakai atau investor kecil. Kelanjutan dan kenaikan penggunaan kontrak berjangka dan option oleh penjual dan pembeli mengisyaratkan perdagangan kontrak untuk representasi dari harga yang umum atas permintaan dan penawaran dalam pasar fisik. Jika suatu forward kontrak yang diatas menguntungkan suatu pihak pembeli atau penjual, kemudian dijadikan transaksi futures kontrak (exchange futures for physical -EFP) dapat mengatasi keengganan dan kadang-kadang berlawanan dengan pihak yang mempunyai kekuatan di pasar. Secara alamiah kekuatan ini cenderung mempertahankan status quo daripada merubahnya dengan persaingan yang murni.

12. *Penetapan kontrak berjangka.* Kontrak berjangka merupakan unsur yang sangat penting dan menentukan untuk dapat terselenggaranya kegiatan perdagangan secara baik dan dapat diminati oleh para pelaku pasar. Oleh karena itu sebelum kontrak berjangka di perdagangkan terlebih dahulu dilakukan penelitian antara lain diteliti kebutuhannya, manfaatnya bagi pengusaha dan perekonomian dan kemungkinan peluang bisnis serta kemungkinan likuiditas kontrak tersebut. Di samping itu, diteliti juga proposal dan spesifikasi kontrak tersebut, khususnya mengenai persyaratan standar yang tercantum didalamnya, termasuk mata uang yang dipergunakan.

13. *Spesifikasi kontrak harus akurat.* Spesifikasi kontrak sekurang-kurangnya terdapat jam perdagangan, bulan penyerahan, hak dan tanggung jawab penjual dan pembeli, volume dan mutu yang dapat diserahkan, tempat penyerahan, tata cara dan penyerahan dokumen, mata uang dan perubahan harga minimum, batas fluktuasi harga yang diijinkan dan proses kliring, cidera janji dan penyelesaian sengketa serta keadaan darurat.

14. *Infrastruktur yang cukup.* Tersedianya fasilitas dan infrastruktur pasar berjangka yang strategis dan memadai. Sarana dan fasilitas penunjang merupakan suatu syarat mutlak dalam perdagangan dalam jumlah yang cukup memadai maupun persyaratan dalam penyerahan barang. Tempat perdagangan harus mempunyai fasilitas penyelesaian perdagangan berjangka dalam bentuk cash settlement, mekanisme perdagangan yang jelas. Sehingga harga yang terjadi pada saat penyerahan dan harga pada masa yang akan datang akan sama dan berakhir berdasarkan bulan pada saat terjadi transaksi kontrak yang diperdagangkan. Dengan demikian sarana dan fasilitas tidak hanya sebagai sarana untuk memperlancar kegiatan perdagangan namun termasuk disini adalah fasilitas telekomunikasi, transportasi, dan lain sebagainya.

15. *Informasi harga akurat.* Tersedianya informasi harga yang up to date yang bebas bagi seluruh pelaku pasar. Di samping itu, informasi harga harus lancar dan tersedia bagi semua peserta yang berhubungan dengan komoditi yang diperdagangkan. Informasi harga di bursa harus tersedia dan disebar luaskan setiap saat bagi seluruh masyarakat pengguna jasa informasi. Terutama pada pusat fasilitas perdagangan dan sarana teknologi yang merupakan persyaratan informasi bursa harus lancar dan akurat. Tersedianya jaringan informasi yang berkaitan dengan perdagangan komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka yang dapat diakses secara mudah oleh semua pihak.

16. *Iklm usaha kondusif.* Adanya iklim usaha yang kondusif dan mendukung terhadap bisnis yang berkelanjutan. Keadaan ekonomi, politik, hukum dan peraturan-peraturan yang ada harus dapat mendukung dan mendorong lingkungan usaha serta kebijakan moneter yang bebas khususnya lalu lintas devisa. Dengan demikian para pengusaha akan berlomba dalam perdagangan berjangka, apabila mereka mendapat keuntungan karena lingkungan berusaha yang kondusif.

Bagian kedua

# Tindak Pidana Perdagangan Berjangka Komoditi

\*) Aridono Sukmanto, mantan Kasubbid Perbankan, Mabes Polri, saat ini Waka Polda Sulteng.

Berbagai bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana dapat ditujukan baik kepada orang secara individu/perorangan atau secara kelompok/beberapa orang atau badan hukum (rects person).

Suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana apabila telah memenuhi persyaran unsure delik pidana sebagai berikut :

- Adanya perbuatan yang dilakukan, baik oleh orang atau badan hukum
- Perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum
- Perbuatan tersebut dilakukan dapat atas dasar kesalahan dengan sengaja (dolus) atau lalai (culpa)
- Adanya produk hukum yang mengatur terlebih dahulu vide Pasal 1 ayat (1) KUHP.
- Perbuatan dilakukan secara bertanggung jawab (pelaku cakap/dewasa)

Korporasi mulai dapat diposisikan sebagai subyek hukum pidana setelah ditetapkannya UU Darurat No. 7 Tahun 1955, tentang Pengusutan, Penuntutan dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 11 PNPS Tahun 1964, tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi, menyusul pemberlakuan UU No. 32 Tahun 1997, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No. 23 Tahun 1999, tentang Lingkungan Hidup, UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 21 Tahun 2002, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 38 Tahun 2004, tentang Jalan.

Beberapa bentuk perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana telah ditetapkan dalam UU No. 32 Tahun 1997 adalah sebagai berikut :

- Melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka tanpa memiliki izin usaha, pelaku bertindak sebagai ; pialang berjangka, penyalur amanat nasabah pada bursa luar negeri, penasihat berjangka , pengelola sen-

tra dana berjangka diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 6.500.000.000,00 (enam miliar limaratus juta rupiah) vide Pasal 71 ayat (1).

- Melakukan kegiatan sebagai pialang dan penasihat berjangka, melakukan transaksi dan kontrak berjangka pada bursa berjangka yang tidak ada ijin usaha dari Bappebti dapat diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) vide Pasal 71 ayat (2).

- Melakukan kegiatan sebagai pialang berjangka tetapi bukan dari anggota pialang berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang tidak memiliki ijin kegiatan dari Bappebti dan melakukan kegiatan usaha sebagai Pengelola Sentra Dana Berjangka tanpa ijin usaha yang syah, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) vide Pasal 71 ayat (3).

- Melakukan manipulasi, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) vide Pasal 72.

- Badan usaha tidak memiliki modal yang cukup diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) vide Pasal 73 ayat (1).

- Membocorkan rahasia, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) vide Pasal 73 ayat (2).

- Mengabaikan keadaan keuangan nasabah/investornya, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp.

1.000.000.000,00 [satu miliar rupiah] vide Pasal 73 ayat (3).

- Tidak mematuhi atau menghambat pelaksanaan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 [satu miliar rupiah] vide Pasal 75.

## Modus Operandi

Beberapa tindak pidana di atas dilakukan oleh para pelaku dengan menggunakan cara-cara atau modus operandi yang beragam, sehingga perlu adanya suatu kewaspadaan di dalam melakukan transaksi.

Modus operandi yang biasa dilakukan oleh para pelaku dikemas sedemikian dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang terus berkembang.

Adapun pola kejahatan dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :

1. Bucketing
2. Trading a head of costumer
3. Matching orders
4. Prearranged trading
5. With holding orders
6. Disclosing orders
7. Wash trading
8. Churning
9. Allocation schemes
10. Manipulasi pasar
11. Penipuan
12. Insider trading
13. Position limit and reportable position

Selain beberapa perbuatan atau tindak pidana yang telah disebutkan di atas, masih terdapat beberapa perbuatan atau tindak pidana lain yang telah diatur di dalam produk perundang-undangan tersendiri yang berpotensi terjadi atau sebagai delik awal (predicate crime ) yang kemudian berlanjut kedalam kegiatan transaksi pada Perdagangan Berjangka Komoditi, seperti :

- UU No. 11 Th. 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No. 8 Th. 1999, tentang Perlindungan Konsumen
- UU No. 7 Th. 1992, tentang Tindak Pidana Perbankan
- UU No. 25 Th. 2003, tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
- KUHP (Penipuan, Suap, Penggelapan, Pengancaman)
- UU No. 31 Th. 1999, tentang Tipidkor
- UU No. 16 Th. 2000, tentang Pajak.

Di dalam melakukan penegakan hukum terhadap segala bentuk tindak pidana, pada dasarnya Polri senantiasa akan tetap konsisten terhadap apa yang telah menjadi tugas dan kewenangannya sebagaimana telah diamanatkan didalam ketentuan perundang-undangan. Demikian halnya dalam melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana di bidang perdagangan berjangka komoditi.

## PPNS Bappebti

Sebagaimana telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi, didalam ketentuan Pasal 68 ayat (4) peran Polri sebagai koordinator pengawas terhadap segala bentuk kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di lingkungan Bappebti sejak awal dimulainya penyidikan, dan dalam ayat (5) Pasal yang sama Polri akan memberikan bantuan sesuai kewenangannya untuk melakukan tindakan berdasarkan hukum yang bertanggungjawab di dalam hal pelaksanaan upaya paksa atas permintaan dari pihak PPNS Bappebti yang bersifat repressif justisial berupa ; penangkapan dan penahanan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat terbatasnya kewenangan serta sarana dan prasarana berupa rumah tahanan yang ada pada penyidik PPNS Bappebti.

Dalam hal apabila penyidik Polri melakukan penyidikan yang ada keterkaitannya dengan kegiatan perdagangan berjangka tidak terlepas dari bentuk koordinasi dan kerjasama antara Polri dengan Bappebti. Di sisi lain juga sebagai bentuk kepedulian Polri dalam upaya penegakkan hukum mengingat sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang disamping adanya keterbatasan penyidik PPNS Bappebti untuk menjangkau sistem perundang-undangan didalam tindak pidana di luar lingkup kewenangan Bappebti.

Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, Polri diwajibkan menerima segala bentuk pengaduan atau laporan dari masyarakat. Demikian halnya apabila ada masyarakat yang melaporkan adanya suatu peristiwa terkait tindak pidana di bidang perdagangan berjangka.

Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut Polri hanya bersifat melakukan penanganan awal, dan untuk selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU No. 32 Tahun 1997, penanganan perkara akan diserahkan kepada penyidik PPNS Bappebti untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dengan tetap bertindak sebagai koordinator di bidang tekhnis penyidikan. Selesai. ▲



Laurentius Gunawan

# Gasak Transaksi Multilateral

**L**ama tidak bertemu dengan tokoh penting dibalik PT Agrodana Futures, ini, Laurentius Gunawan, tampak tidak ada perubahan dari rawut wajahnya. Begitu-begitu saja, masih kelihatan muda dan penuh semangat.

"Kesibukan saya masih sama seperti yang dulu, mengurus perusahaan dan memantau transaksi para nasabah," kata Presiden Direktur PT Agrodana Futures, ini singkat.

Yang berubah dari keseharian ayah dua orang anak ini adalah, mengoperasikan perusahaan pialang itu dari ujung Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Pluit Permai Raya. Semula, Agrodana beroperasi dan menempati salah satu gedung mewah di sekitar Jalan Sudirman, Jakarta Pusat.

Tentang kepindahan kantor itu, Gunawan pun berturut, "sejak terkuak kasus Bank Century, banyak pihak yang mengaitkan kasus tersebut dengan Agrodana. Hal itu tidak bisa dipungkiri, karena salah satu pemegang saham Agrodana juga merupakan direksi dari bank tersebut."

"Tetapi pada dasarnya, tidak ada hubungannya antara bank itu dengan Agrodana. Kebetulan saja direksi bank itu menjadi salah satu pemegang saham di Agrodana," jelas Gunawan.

Jadi untuk menghindari image negatif Agrodana, tambahnya, kami pun memilih pindah ke sini tahun 2009. "Image itu perlu kami pertahankan, karena diindustri perdagangan berjangka ini, Agrodana sebelumnya sudah memiliki posisi yang cukup dipandang. Dilihat dari volume transaksi dan performa perusahaan."

"Hal itu pula yang kami lakukan hingga saat ini, meski berada di ping-

giran Jakarta Utara. Apa lagi dengan kemudahan teknologi saat ini, di mana saja kita bisa melakukan transaksi," kilah Gunawan.

Apa yang diutarakan peraih gelar S2 dari Univ. Mercu Buana, ini, agaknya memiliki kebenaran. Hal itu ditunjukkan dengan volume transaksi Agrodana yang senantiasa mencapai target perusahaan. Dari informasi yang dihimpun, Agrodana termasuk salah satu perusahaan pialang berjangka anggota bursa Jakarta Future Exchange (JFX), yang memiliki volume transaksi multilateral terbaik. Bahkan, dari total volume transaksi Agrodana, transaksi multilateral sangat mendominasi. Tidak seperti kebanyakan perusahaan pialang yang ada, transaksi bilateral lebih dominan dibandingkan transaksi multilateral.

"Kami tetap melayani transaksi sistem perdagangan alternatif (SPA)-bilateral, tetapi kami juga berupaya menawarkan transaksi multilateral. Karena transaksi multilateral itu sudah ketentuan yang harus dipatuhi, dengan adanya kebijakan otoritas perdagangan berjangka," jelas Gunawan.

Upaya yang ditempuh Agrodana menawarkan transaksi multilateral nyata membawa hasil. Dari Tim Komoditi yang dibentuk Agrodana dan di bawah koordinasi Gunawan, transaksi multilateral rata-rata mencapai 80 % dari total volume transaksi. Anggota Tim Komoditi Agrodana saat ini ada sebanyak 3 orang, dan ditambah Gunawan selaku koordinator. Sedangkan Wakil Pialang Berjangka yang dimiliki saat ini ada sebanyak 10 orang.

"Memang benar, volume transaksi multilateral Agrodana mencapai

80 %, sedangkan yang bilateral sekitar 20 %. Dari tahun 2005, Agrodana selalu berada pada lima besar untuk transaksi bilateral. Tetap sejak tahun 2010, lalu, kami termasuk lima besar dalam transaksi kontrak multilateral," pengakuan Gunawan.

Saat ini para investor Agrodana cukup aktif bertransaksi untuk kontrak multilateral, terutamanya kontrak berjangka komoditi emas, tambahnya. Rata-rata investor itu merupakan pelaku pasar fisik emas di Jakarta.

"Jadi mereka senantiasa mengikuti pergerakan harga emas di pasar global. Apalagi belakangan ini harga emas cukup menjanjikan keuntungan dari lonjakan-lonjakan harga emas dunia," jelas Gunawan, bersemangat.

Lebih jauh Gunawan berturut, sejak tahun 2009 di mana Agrodana memilih untuk pindah kantor, sejumlah cabang yang ada di daerah telah menutup. "Kami hanya mempertahankan kantor cabang Agrodana yang ada di Bandung. Sedangkan kantor cabang yang tadinya ada di Surabaya, Malang, Semarang dan Solo, semuanya sudah ditutup. Jadi Agrodana saat ini hanya ada di Jakarta dan Bandung."

"Untuk saat ini Agrodana belum berniat membuka kantor cabang di daerah lain. Kami lebih memilih mengembangkan usaha ini dengan dua kantor yang ada. Menjadi anggota BKDI pun kami masih belum terpikir. Karena masih banyak yang harus dipertimbangkan dan dipersiapkan. Kita lihat saja nanti bagaimana hasil dari amandemen undang-undang perdagangan berjangka komoditi," kata Laurentius Gunawan. ▲